



KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa- Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugraha Nya, Pemerintah Provinsi Bali dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Bali Tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019.

LKjIP Provinsi Bali ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan mengingat implementasi sistem akuntabilitas masih perlu penyempurnaan secara terus menerus, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin melalui koordinasi antar instansi terkait dan diskusi bersama terhadap permasalahan yang memerlukan asistensi nara sumber. Mudah-mudahan LKjIP Provinsi Bali dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan pada tahun berikutnya.

GUBERNUR BALI

WAYAN KOSTER



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis	6
B. Strategi dan Arah Kebijakan Umum	25
C. Indikator Makro Tahun 2018	26
D. Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Evaluasi Kinerja	33
B. Analisis Pencapaian Kinerja	36
BAB IV PENUTUP	145
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
Pengukuran Kinerja 2019	

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Bali.	12
2. Tabel 2.2 : Perbandingan Capaian/Realisasi Indikator Makro Provinsi Bali Tahun 2018 s.d 2019	19
3. Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019.	23
4. Tabel 3.1 : Perbandingan Capaian/Realisasi Indikator Makro Provinsi Bali Tahun 2018 s.d 2019	32
5. Tabel 3.2 : PDRB Perkapita (ADHK) 2010 (Milyar Rupiah) Tahun 2014 s.d 2019	45
6. Tabel 3.3 : PDRB Perkapita Nominal (ADHB) Menurut Provinsi Tahun 2014 s.d 2019	46
7. Tabel 3.4 : Laju Inflasi Oktober 2019, Tahun Kalender 2019 dan Oktober 2019 terhadap Oktober 2018 Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar	49
8. Tabel 3.5 : Sumbangan (Andil) Inflasi/Deflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar 2019	50
9. Tabel 3.6 : Inflasi Bulanan, Tahun Kalender dan Tahunan Kota Denpasar 2016-2019	51
10. Tabel 3.7 : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2018-Maret 2019	53
11. Tabel 3.8 : Garis Kemiskinan dan Perubahan Menurut Daerah September 2018- Maret	55



				2019
12.	Tabel	3.9	: Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Bali Menurut Daerah, September 2018-Maret 2019	56
13.	Tabel	3.10	: Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2018-2019	58
14.	Tabel	3.11	: Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2018-2019	60
15.	Tabel	3.12	: Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status pekerjaan Utama Tahun 2018-2019	61
16.	Tabel	3.13	: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Komponen, 2010-2018	72
17.	Tabel	3.14	: Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2019	74
18.	Tabel	3.15	: Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2018	77
19.	Tabel	3.16	: Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah	79
20.	Tabel	3.17	: Indeks Nilai Tukar Petani Provinsi Bali dan Perubahannya Menurut Subsektor November 2019-Desember 2019	85
21.	Tabel	3.18	: Indeks Nilai Tukar Petani Bali dan Nasional serta Persentase Perubahannya, November 2019 – Desember 2019	86
22.	Tabel	3.19	: Indeks Nilai Tukar Usaha Pertanian per Subsektor dan Persentase Perubahan November 2019 – Desember 2019	86



23.	Tabel	3.20	: Keadaan penduduk menurut kelompok umur balita, usia sekolah, usia produktif dan usia tua tahun 2019	91
26.	Tabel	3.21	: Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditamatkan	92
27.	Tabel	3.22	: Status Indeks Pencemaran Sungai di Bali Tahun 2019	98
28.	Tabel	3.23	: Nilai Indeks Pencemaran Danau di Bali Tahun 2019	99
29.	Tabel	3.24	: Nilai Indeks Pencemaran Air Laut Tahun 2018-2019	100
30.	Tabel	3.25	: Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2018-2019	100
			:	
			:	

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik			Halaman
1.	Grafik	3.1 : Kontribusi 3 (Tiga) Lapangan Usaha Dengan Pertumbuhan Tertinggi pada PDRB Bali menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 (persen)	36
2.	Grafik	3.2 : Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2019 (persen)	36
3.	Grafik	3.3 : Laju Pertumbuhan (tiga) lapangan usaha dengan Kontribusi terbesar terhadap PDRB Triwulan IV-2019 Provinsi Bali	37
4.	Grafik	3.4 : Persentase Pertumbuhan Triwulan III Lapangan Usaha Utama PDRB Provinsi Bali Tahun 2018-2019	39
5.	Grafik	3.5 : Laju Pertumbuhan (%) Tiga Komponen Pengeluaran Tertinggi Kumulatif Triwulan IV Tahun 2019 (IPM) Provinsi Bali 2010-2017	42
6.	Grafik	3.6 : Sumber Pertumbuhan (%) Komponen Pengeluaran Kumulatif IV Tahun 2019	42
7.	Grafik	3.7 : Laju Pertumbuhan (%) Tiga Komponen Pengeluaran Tertinggi Triwulan IV Tahun 2019	43
8.	Grafik	3.8 : Sumber Pertumbuhan (%) Komponen Pengeluaran Triwulan IV Tahun 2019	43
9.	Grafik	3.9 : Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Oktober 2017-Oktober 2019	48



10.	Grafik	3.10	: Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar Oktober 2019	50
11.	Grafik	3.11	: Perkembangan Kemiskinan di Bali Maret 2015-Maret 2019	54
12.	Grafik	3.12	: 10 Negara Tujuan Utama Ekspor Provinsi Bali Keadaan Bulan September 2019	62
13.	Grafik	3.13	: Perkembangan Nilai Impor <i>Capital Goods</i>	62
14.	Grafik	3.14	: Realisasi Pengadaan Semen di Bali	63
15.	Grafik	3.15	: Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) di Bali	65
16.	Grafik	3.16	: Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama	67
17.	Grafik	3.17	: Pangsa Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Utama	68
18.	Grafik	3.18	: Pertumbuhan Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Utama	69
19.	Grafik	3.19	: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali 2010-2018	72
20.	Grafik	3.20	: Perkembangan Rata-rata Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Petani dan Penggilingan Provinsi Bali November 2018 – Desember 2019	87



21.	Grafik	3.21	: Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Bali, 2010 – 2018	88
22.	Grafik	3.22	: Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah Bali, 2010 - 2018	90
23.	Grafik	3.23	: Perbandingan Pertumbuhan APS Penduduk Usia 16 – 18 tahun Provinsi Bali dan Rata-rata APS Nasional	90
24.	Grafik	3.24	: Perbandingan HLS Provinsi Bali dan HLS Nasional	96
25.	Grafik	3.25	: Posisi HLS Bali di tingkat nasional	97
26.	Grafik	3.26	: Indeks Kualitas Udara Bali Tahun 2011-2019 (Udara Ambien → Metode Hisap).	100
27.	Grafik	3.27	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2014-2019	101
28.	Grafik	3.28	: Jumlah Emisi CO ₂ eq tahunan dari tahun 2000 sampai 2018 di Bali	102



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar 3.1 : Perekonomian Provinsi Bali .	34
2. Gambar 3.2 : Inflasi Bali.	47
3. Gambar 3.3 : Kunjungan Gubernur Bali Ke Penduduk Miskin.	51
4. Gambar 3.4 : Job Fair.	57
5. Gambar 3.5 : Gubernur beri penghargaan pendidikan bagi penyandang disabilitas	70
6. Gambar 3.6 : IPM Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia 2018	73



RINGKASAN EKSEKUTIF

Memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Pemerintah Provinsi Bali menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan *resources* yang tersedia. Penyusunan LAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi Laporan Kinerja ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Implementasinya dijabarkan dalam pencapaian prioritas Pembangunan Provinsi Bali yang dituangkan dalam Indikator kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Uraian Laporan Kinerja ini menyajikan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Bali, Indikator kinerja, yang didukung oleh Program, Kegiatan, Anggaran, Capaian, masalah dan upaya mengatasi masalah agar capaian program pada tahun mendatang menjadi lebih baik.

Dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Semesta Berencana Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Pemerintah Provinsi Bali disamping melaksanakan program-program yang konvensional pada semua bidang/sector, juga melaksanakan terobosan-terobosan baru (*inovation breakthrough*) pada beberapa bidang-bidang yang strategis sebagai upaya akselerasi (percepatan) pencapaian tujuan.

Program Prioritas yang dilaksanakan pada Tahun 2019 meliputi :

1. Bidang Pendidikan :

Dilaksanakan Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Bahasa guna mendukung SDM bali, Program Pembinaan SMA, Program Pembinaan SMK,



Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dan Program Pengembangan Teknologi Pendidikan.

2. Bidang Kesehatan :

Dilaksanakan program kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk mendukung fasilitas kesehatan yang merata di seluruh Provinsi Bali, serta puskesmas yang layak bagi Krama Bali, Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Program Penguatan Surveilans dan Imunisasi, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular, Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan, Program Pendidikan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

Dilaksanakan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya, Program Perencanaan Tata Ruang, Program Penataan Bangunan dan Lingkungan, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Program Penyelenggaraan Jalan Provinsi, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum, Program Penyehatan Lingkungan Permukiman, Program Peningkatan Pengujian Laboratorium dan Alat Berat, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Minum dan Air Limbah.

4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman :

Dilaksanakan program Pengembangan Kawasan Permukiman dan Program Pengembangan Perumahan.

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :

Dilaksanakannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pol PP, Program Penegakan Produk Hukum Daerah, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.



6. Bidang Sosial :

Dilaksanakan program penanganan fakir miskin, program pengembangan sarana dasar perumahan dan permukiman, program rehabilitasi sosial, Program pemberdayaan sosial, program perlindungan dan jaminan sosial dan program pelayanan sosial.

7. Bidang Bencana :

Dilaksanakan program pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, program penanganan darurat bencana, peralatan dan logistik kebencanaan, program pemulihan pasca bencana, program pengendalian bencana.

8. Bidang Tenaga Kerja :

Dilaksanakan program penempatan dan perluasan kesempatan kerja, program peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, program perlindungan tenaga kerja, program peningkatan kompetensi calon tenaga kerja, program peningkatan kualitas lingkungan kerja dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja.

9. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

Dilaksanakan program Pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan dan program perlindungan anak.

10. Bidang Pangan :

Dilaksanakan program peningkatan ketersediaan pangan, program mendukung ketahanan pangan melalui kedaulatan beras, program peningkatan peganekaragaman konsumsi pangan, program peningkatan keamanan pangan segar dan program peningkatan sertifikasi mutu pangan segar

11. Bidang Lingkungan Hidup

Dilaksanakan Program penataan dan penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hutan, program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, program pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan dan peningkatan kualitas pelayanan persampahan



12. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dilaksanakan Program Pemberdayaan usaha ekonomi desa (UED), program produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades) berbasis teknologi tepat guna, program peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dan program peningkatan kapasitas pemerintahan desa.

13. Bidang Komunikasi dan Informatika

Dilaksanakan program pengelolaan dan penyerbarluasan informasi public, program pengembangan komunikasi, informasi dan Media Massa, Program Pengembangan Insfrastruktur TIK dan program pengelolaan aplikasi dan sistem informasi.

14. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dilaksanakan program peningkatan pengawasan koperasi, program penguatan kelembagaan keperasi, program pengembangan dan penciptaan iklim usaha koperasi, program penciptaan iklim usaha dan pengembangan kewirausahaan usaha mikro, kecil dan menengah.

15. Bidang Kebudayaan

Dilaksanakan program pelestarian dan pengembangan seni budaya, program penguatan lembaga adat, program pelestarian bahasa, aksara dan satra, program pelestarian nilai tradisi, program pelestarian cagar budaya dan permuseuman, rigram peningkatan kualitas UPTD Taman budaya, Musium Bali dan Manumen perjuangan rakyat bali.

16. Bidang Keluatan dan Perikanan

Dilaksanakan program pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, program pengembangan perikanan tangkap, program pengembangan budidaya ikan, program peningkatan nilai tambah hasil perikanan, program peningkatan pengawasan pelaku usaha perikanan, program pengembangan teknologi perikanan budidaya air payau/laut, program peningkatan pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan, program pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan program peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap dipelabuhan.



17. Bidang Pariwisata

Dilaksanakan program pengembangan destinasi pariwisata, Kelembagaan dan Pemasaran pariwisata dan industry pariwisata.

18. Bidang Pertanian

Dilaksanakan peningkatan prasarana sarana dan penyuluh pertanian, program peningkatan produksi dan pengembangan agribisnis komoditas perkebunan, program pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan Sarana produksi pertanian, program perlindungan tanaman pangan, program pengembangan pertanian Gumi Banten.

Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja seluruh program dan kegiatan sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 sebagaimana tersaji dalam Laporan Kinerja ini, hampir seluruh program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) memperlihatkan capaian kinerja yang baik, bahkan beberapa indikator-indikator pendidikan dan kesehatan sudah berada di atas rata-rata Nasional. Dengan demikian secara umum kinerja Pemerintah Provinsi Bali, baik secara kuantitatif maupun kualitatif sudah termasuk kategori baik. Pencapaian kinerja ini dipengaruhi beberapa variabel seperti kepemimpinan yang visioner, komitmen membangun pemerintahan yang berkinerja baik dan akuntabel, serta sinergi seluruh jajaran aparatur Pemerintah Provinsi Bali. Kekurangan, kelemahan, capaian yang belum optimal menjadi referensi dalam perencanaan kinerja ke depan.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah Bali pada masa mendatang masih menghadapi tantangan yang berat mengingat kondisi perekonomian daerah yang masih fluktuatif, angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, serta terbatasnya secara nyata sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Perhatian pemerintah, sektor swasta dan segenap komponen masyarakat sangat diperlukan guna menyikapi tantangan tersebut, termasuk pula keharusan pemerintah untuk terus melakukan regulasi, deregulasi, debirokratisasi, rekapitalisasi, reposisi, relokasi dan restrukturisasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman dan sejahtera.

Untuk menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat.

Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perencanaan pembangunan daerah, Provinsi Bali memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan



lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*good governance*).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam salah satu pasal dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan setiap penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Provinsi Bali beserta Pejabat Eselon II diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2019 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan utama yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan Perencanaan



taktis strategis, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan selama satu tahun anggaran dan RPJMD Semesta Berencana Pemerintah Provinsi Bali tahun 2018-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Sasaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2019 adalah sebagai Laporan pencapaian sasaran Strategis Perangkat Daerah berupa pelaksanaan program dan kegiatan utama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan pencapaian sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan Laporan pencapaian Sasaran Strategis berupa analisis hasil Pengukuran pencapaian sasaran serta rangkuman hasil kinerja masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana telah direncanakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

LAKIP Provinsi Bali disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);



- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun 2019;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2019.
- Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2019 adalah :

1. Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019;
2. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Provinsi Bali Tahun 2019 sesuai Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal



(Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategis meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. VISI

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur hasil pemilihan kepala daerah tahun 2018 yang telah resmi dilantik pada tanggal 5 September 2018. Visi “***Nangun Sat Kerthi Loka Bali***” dengan 22 misi diwujudkan melalui pola pembangunan semesta berencana yang dilaksanakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi. Pola pembangunan semesta berencana merupakan model pembangunan untuk mencapai kehidupan masyarakat Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sesuai dengan Tri Sakti Bung Karno dan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Pembangunan Semesta Berencana berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali *Sad Kerthi* yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (*atma kerthi*), penyucian laut (*segara kerthi*), penyucian sumber air (*danu kerthi*), penyucian tumbuh-tumbuhan (*wana kerthi*), penyucian manusia (*jana kerthi*) dan penyucian alam semesta (*jagat kerthi*) sertalandakan filosofi *Tri Hita Karana* yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

Penyelenggaraan pembangunan Semesta Berencana Bali harus dilakukan dengan paradigma/pendekatan yang meliputi 7 (tujuh) prinsip:

1. Pembangunan yang mengandung dimensi *sakala* dan *niskala*, yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur



tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, sukses, dan rahayu.

2. Pembangunan bersifat Holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antarwilayah Kabupaten/Kota se-Bali;
3. Pembangunan bersifat integratif; Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota, bukan membangun di Kabupaten/Kota secara parsial dengan tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Membangun Kabupaten/Kota artinya pembangunan yang diselenggarakan harus melalui proses perencanaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Pembangunan berbasis perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung;
5. Pembangunan Berbasis Kepemimpinan bersifat Kultural. Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan kepemimpinan bersifat kultural, bukan formalistik yang bersifat hierarki dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
6. Pembangunan dengan pendekatan Satu Kesatuan Wilayah. Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan



pembangunan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola;

7. Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali. Pembangunan Bali dalam berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan kepemimpinan yang lurus, *lascarya*, prinsipil, berani, dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam *nindihin* Gumi Bali, guna menjaga dan memelihara *Genuine* Bali; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka perlu dituangkan dalam bentuk Misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai, dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui dua puluh dua misi pembangunan Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.



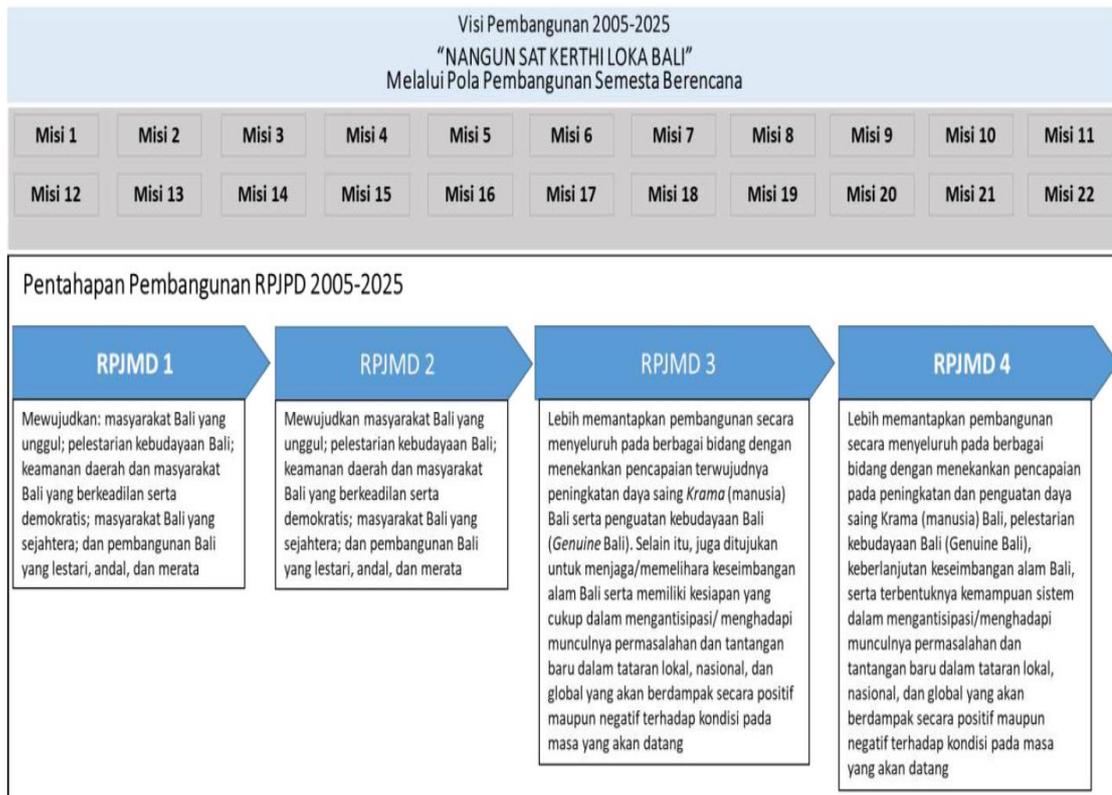
4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral, serta memiliki jati diri kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.
10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.
11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sakala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih, yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.



13. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar-Kabupaten/Kota se-Bali.
14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar-Kabupaten/Kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru.
15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.
18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antarwilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.
20. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik, dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang bersih, hijau dan indah.

22. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahap rencanapembangunan jangka menengah (RPJMD). Saat ini, RPJMD Provinsi Bali akan memasuki periode 2018-2023. Secara ringkas, hubungan antara RPJMD Semesta Berencana dan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali dapat dilihat pada Gambar 1.4.



3. Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan Tujuan akan mengarah



kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Bali

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
1	Memastikan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan, Sandang dan Papan Dalam Jumlah dan Kualitas yang Memadai bagi Kehidupan Krama Bali	Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan Kualitas yang layak	Tingkat Infasi Bali	Meningkatnya Ketahanan pangan bagi Krama Bali	Ketersediaan Pangan Utama
2	Mewujudkan Kemandirian Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian serta Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTTP)
				Meningkatnya kualitas hasil pertanian dan pertanian krama bali	Nilai Tukar Petani (NTP)



1	2	3	4	5	6
					Nilai Tukar Nelayan (NTN)
3	Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang terjangkau, Merata, Adil dan Berkualitas serta didukung dengan pengembangan Sistem dan Data Base Riwayat Kesehatan Krama Bali berbasis Kecataman	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	Umur Harapan Hidup (UHH)	Meningkatnya Standar kualitas Pelayanan kesehatan Krama Bali	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan
4	Memastikan peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	Terwujudnya wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	Terwujudnya Wajib belajar 12 Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18
				Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah terjangkau, merata, adil dan berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah



1	2	3	4	5	6
5	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing Tinggi yaitu Berkualitas dan Berintegritas, Bermutu, Profesuonal dan Bermoral serta memiliki Jatidiri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali	Terwujudnya Daya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali unggul dan berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Daya Saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Provinsi Bali
6	Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial secara Komprehensif dan Terintegrasi Bagi Kehidupan Krama Bali Sejak Mulai Lahir, Tumbuh dan berkembang sampai akhir masa Kehidupannya	Terwujudnya Kesejahteraan sosial Krama Bali	Persentase Kemiskinan	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Krama Bali	Persentase Kemiskinan
7	Menghasilkan Tenaga Kerja yang Kompeten, Produktif, Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi Serta Memperluas Akses Kesempatan Kerja di Dalam dan di Luar Negeri	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan Berdaya Saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya kompetensi tenaga Kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)



1	2	3	4	5	6
8	Meningkatkan Promosi Pariwisata Bali di Dalam dan Luar Negeri Secara Bersinergi antar Kota/Kabupaten Se- Bali dengan mengembangkan Kreativitas Inovasi	Meningkatnya a pasar Pariwisata Bali	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Meningkatnya pasar Pariwisata Bali di Pasar Domestik dan Global	Jumlah Devisa Sektor Pariwisata
9	Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataa n secara Komprehensif	Meningkatnya Kualitas pelayanan kepariwisataa n	indeks kepuasan wisatawan	Meningkatnya kualitas kepuasan wisatawan	Persentase kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara
10	Membangun dan mengembangkan pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kab/Kota Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi bali	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya investasi yang lebih merata di wilayah Bali	Persentase PMA DAN PMDN diluar wilayah SARBAGITA
11	Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis Budaya (Branding Bali) untuk Memperkuat Perekonomian Krama Bali	Berkembang nya perekonomian berbasis budaya bali	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali		



1	2	3	4	5	6
12	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Darat, Laut Dan Udara) Secara Terintegrasi Dan Terkoneksi Antar Wilayah Untuk Mendukung Pembangunan Perekonomian Serta Akses Dan Mutu Pelayanan Publik Di Bali.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Indeks konektivitas		
13	Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	Angka kriminalitas



1	2	3	4	5	6
14	Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Demokratis Dan Berkeadilan Dengan Memperkuat Budaya Hukum, Budaya Politik Dan Kesetaraan Gender Dengan Memperhatikan Nilai-Nilai Budaya Bali.	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Indeks demokrasi	Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase masyarakat Bali yang terdaftar sebagai pemilih dalam setiap Pemilu/Pilkada
15	Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali, Menata Wilayah Dan Lingkungan Yang Bersih, Hijau Dan Indah.	Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT)	Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks kualitas udara Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
16	Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Terbuka, Transparan, Akuntabel Dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti Dan Murah.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Survey Eksternal Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Sumber : RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.



B. Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi Pemerintah Provinsi Bali, strategi yang akan ditempuh adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dan sistem pembiayaan *cost sharing* dengan kabupaten/kota.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan penguatan kelembagaan masyarakat serta melakukan penegakan hukum secara konsisten.
3. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan pengawasan program-program pembangunan.
4. Mengembangkan instrumen regulasi yang relevan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.
5. Intensifikasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
6. Melaksanakan advokasi ke pemerintah pusat untuk kemungkinan mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru untuk membiayai pembangunan.

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Bali Tahun 2019 disusun berdasarkan rumusan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait, masukan DPRD berupa pokok-pokok pikiran serta penjabaran RPJMD. Selanjutnya Arah Kebijakan Umum ini menjadi kesepakatan antara pihak Legislatif dan Eksekutif, sehingga wajib menjadi pedoman bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



C. Indikator Makro Tahun 2019

Seluruh kebijakan pembangunan yang tertuang dalam sasaran misi dan prioritas pembangunan Tahun 2019 diarahkan untuk mencapai sasaran indikator makro Provinsi Bali Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perbandingan Capaian/Realisasi Indikator Makro Provinsi Bali Tahun 2018 s.d 2019 :

No	Indikator Makro	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Penduduk	4,2 Juta	4,35 juta				
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,35	5,63				
3.	PDRB Perkapita (ADHK)	34 juta	36 juta				
4.	PDRB Perkapita Nominal (ADHB)	50 juta	58 juta				
5.	Inflasi	3,13	1,57				
6.	Tingkat Kemiskinan (%)	3,91	3,79				
7.	Jumlah Penduduk Miskin	171,7 6	163,85				
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,4	1,52				
9.	Gini Ratio	0,36	0,37				
10.	IPM	74,46	74,77				
11.	Investasi	5,57 juta	n/a				
12.	Jumlah Ekspor	n/a	US 45				

Sumber : SIPD Provinsi Bali (Data diolah B. Organisasi 2019)

D. Perjanjian Kinerja

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dan mengacu pada Rencana Kerja



Pemerintah (RKP) Tahun 2019 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat isu strategis, kondisi dan permasalahan pembangunan, kerangka makro ekonomi, prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta perkiraan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019-2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang pada umumnya sering disebut Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam hal ini adalah kegiatan dalam APBD tahun anggaran 2019, disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang : 1) Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; 2) Indikator kinerja sasaran dan target capaiannya.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya. Sasaran yang akan dicapai Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2019 secara rinci disajikan dalam formulir pengukuran kinerja.

Indikator Kinerja Utama adalah tolok ukur kinerja utama berupa indikator pelaksanaan sasaran/program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-Perangkat Daerah). Indikator Kinerja Utama merupakan upaya untuk



menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Bali Tahun 2018-2023 melalui kompilasi seluruh sasaran strategis dari seluruh Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama ini memuat aspek, fokus, indikator dan penjelasan tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan dari Pemerintah Provinsi Bali yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) sebagaimana telah direncanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Arah Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Skala Prioritas APBD Provinsi Bali berdasarkan bidang kewenangan pemerintahan.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari 22 (dua puluh dua) aspek yang menjadi prioritas pembangunan daerah Bali.



Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Bali ditetapkan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, berisi program utama, sasaran yang hendak dicapai dengan target indicator *output* dan atau *outcome* pada tabel terlampir.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan. Pencapaian Indikator Sasaran yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2019
1	2	3	4
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas layak	Tingkat Inflasi Bali	3.5
		Persentase Ketersediaan pangan utama	100
2	Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	16
3	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	27
4	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	Nilai Tukar Petani (NTP)	104.1
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	116.6
5	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	Umur Harapan Hidup	71.8
6	Terwujudnya wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	10
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	82.54
7	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Angka harapan lama sekolah	13.49
8	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia	75.07
9	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali	65
10	Terwujudnya kesejahteraan sosial krama bali	Persentase Kemiskinan	3.85
11	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompoten dan berdaya saing	Tingkat pengangguran terbuka	1.28



1	2	3	4
12	Meningkatnya kompetensi tenaga	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75.77
13	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Indeks Kebahagiaan	72.48
14	Meningkatnya pasar Pariwisata Bali	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	45
15	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	Jumlah Devisa sektor pariwisata	0
16	Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	Indeks Kepuasan wisatawan	77
17	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	6.25
18	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya bali	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	11
19	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar, laut dan udara secara terintegrasi an terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Indeks konektivitas	2.7
20	Meningkatnya rasa aman Krama Bali dan Wisata melakukan aktivitas kehidupannya	Angka Kriminalitas	4.138
21	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Indeks demokrasi	79
		Indeks Pemberdayaan gender	64.23
22	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	Persentase Daya dukung lingkungan	17.11



1	2	3	4
23	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62.08
		Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	9.7
		Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	0.43
24	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	68



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Pelaporan Kinerja Provinsi Bali tahun 2019 ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019, serta pencapaian sasaran strategis selama tahun 2019.

Pengukuran keberhasilan dengan tolak ukur akuntabilitas kinerja mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Penetapan target kinerja atas program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan pada saat pengajuan anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan dalam formulir Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) berupa: *input*, *output*, dan *outcome*. Selanjutnya setelah APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 disetujui dan ditetapkan ditindaklanjuti dengan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019.



A. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek *input*, *output*, maupun *outcome*.

Evaluasi kinerja kegiatan yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap kinerja kegiatan Pemerintah Provinsi Bali, guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang :

1. Efisiensi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
2. Efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
3. Pencapaian sasaran pada tahun berjalan.

Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Namun perbandingan dengan pemerintah daerah lain ataupun dengan standar nasional maupun internasional, akan berusaha dilakukan, hal ini terkendala dari keterbatasan data yang dimiliki. Dalam evaluasi diuraikan mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan (hambatan), serta langkah perbaikan (solusi pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan di masa yang akan datang.

1. Efisiensi Kegiatan

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan *output* yang sama, atau *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang lebih besar. Fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Angka capaian efisiensi diperoleh dengan membandingkan capaian *output* dengan capaian *input*. Angka capaian efisiensi tersebut kemudian dibandingkan dengan standar efisiensi. Dalam laporan ini standar efisiensi yang dipakai adalah angka capaian efisiensi menurut rencana/target, yaitu bila angka capaian efisiensi sama atau lebih besar dari standar efisiensi, maka kegiatan yang bersangkutan dianggap efisien. Sebaliknya bila angka capaian efisiensi lebih kecil dari standar



efisiensi, maka kegiatan tersebut dianggap tidak efisien. Tingkat efisiensi pencapaian sasaran secara umum adalah termasuk kategori efisien. Namun ada beberapa kegiatan yang belum efisien, ketidakefisienan kegiatan-kegiatan tersebut antara lain disebabkan antara lain:

- Kelemahan dalam penetapan target pada indikator output, yang terlalu tinggi.
- Anggaran tersedia sesuai kebutuhan, dan realiasi biaya administrasi tetap dikeluarkan namun realisasi fisik kegiatan masih masih kurang dari yang ditargetkan.
- Kegiatan tidak optimal terealisasi karena pengesahan DPA perubahan baru turun pada bulan Nopember 2019.
- Pembatalan pembangunan fisik.
- Gagal tender dan tender ulang.

Untuk kegiatan-kegiatan yang belum efisien ini, akan dilakukan evaluasi yang lebih mendalam, sehingga kegiatan pada tahun berikutnya dapat lebih efisien, antara lain :

- Percepatan proses pengadaan barang/jasa di Biro Pengadaan Barang Jasa maupun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
- Menyusun rencana kerja kegiatan Tahun Anggaran 2019 baik itu bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan yang terintegrasi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan anggaran kas Tahun Anggaran 2019.
- Mencermati kembali Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan anggaran kas Tahun 2019, bila terdapat kesalahan baik substansi kegiatan maupun kode rekening agar segera direvisi.



2. Efektivitas Kegiatan

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai “tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan”. Pengukuran efektivitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator *outcome* dari kegiatan tersebut.

Efektivitas kegiatan di bagi atas dua macam, yaitu:

(a) Efektivitas individual kegiatan;

Efektivitas individual kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan mencapai target *outcome/benefit/impact* yang telah ditetapkan untuk kegiatan yang bersangkutan.

(b) Efektivitas terkait sasaran.

Sedangkan efektivitas terkait sasaran merupakan kemampuan kegiatan bersama-sama dengan kegiatan lain untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategisnya.

2.1) Kegiatan Yang Efektif

Suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata *outcome* minimal 100 persen. Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif, antara lain adalah tersedianya dana dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan kegiatan serta tingginya komitmen para pelaksana/penanggungjawab kegiatan untuk menghasilkan yang terbaik. Namun perbaikan-perbaikan masih perlu terus dilakukan, antara lain melalui penyempurnaan kualitas indikator kinerja dan peningkatan validitas data realisasi kinerja.

2.2) Kegiatan Yang Kurang Efektif

Kegiatan dinyatakan kurang efektif apabila capaian rata-rata indikator *outcome*-nya di bawah 100 persen. Kegiatan yang kurang/tidak efektif antara lain disebabkan oleh faktor eksternal yang *uncontrolable*, lemahnya kemampuan SDM pelaksana/penanggungjawab kegiatan, dan lemahnya pembinaan dari atasan langsung. Bagi SDM yang tidak



mempunyai kemampuan dalam pengelola kegiatan, akan dilakukan pembinaan/peningkatan pengetahuan/ketrampilan personil melalui kegiatan pendidikan/pelatihan, mengingat Pemerintah Provinsi Bali memandang bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu aset penting yang harus ditingkatkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai misinya. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan akan dievaluasi secara lebih mendalam mengenai kelangsungannya. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Bali akan melakukan langkah-langkah penyempurnaan, antara lain berupa penyempurnaan indikator kinerja, validitas data kinerja, peningkatan kualitas pengendalian dan monitoring, serta peningkatan kemampuan/kualitas atasan langsung dari pelaksana/penanggungjawab kegiatan.

2.3) Kegiatan Yang Belum Dapat Diukur Efektivitasnya

Kegiatan yang belum dapat diukur efektivitasnya adalah kegiatan yang belum dirumuskan indikator kinerja outcome-nya. Selama tahun 2019, tidak terdapat terdapat kegiatan yang termasuk di dalam katagori ini.

Jadi tidak terdapat hambatan dalam penentuan indikator kinerja, hal ini menunjukkan kemampuan pengelola kegiatan sudah memadai dalam merumuskan indikator kinerja kegiatan sesuai pedoman yang berlaku. Pada tahun berikutnya, akan lebih ditingkatkan pengelola kegiatan untuk lebih mampu merumuskan indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakannya.

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali (LKJIIP) Tahun 2019 memuat data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan solusi pemecahan masalah secara lebih luas dan mendalam. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran.



Analisis atas pencapaian sasaran strategis dari indikator kinerja utama selama Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Gubernur Bali berupa dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Bali, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah tentang Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Bali Tahun 2019 dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

1. Capaian Indikator Makro

Tujuan pembangunan Provinsi Bali telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Provinsi Bali telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri.

Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam indikator makro pembangunan daerah, yang akhirnya bermuara terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Atas dasar telah ditetapkannya indikator tersebut, maka kinerja pembangunan daerah dapat diukur, melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator makro. Tetapi persoalan yang perlu dicermati bersama adalah ketercapaian setiap indikator makro tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh stakeholder pembangunan yang meliputi : Pemerintah, Swasta dan, Masyarakat.

Oleh karena itu dalam menyikapi kinerja kebijakan pemerintah dalam konstelasi pencapaian indikator makro, perlu diterjemahkan terlebih dahulu kerangka pikir kontribusi kebijakan dan pelaku terhadap capaian indikator makro tersebut. Sehingga gambaran pencapaian indikator makro merupakan hasil kinerja dari seluruh pelaku pembangunan, dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.1 Perbandingan Capaian/Realisasi Indikator Makro Provinsi Bali Tahun 2018 s.d. Tahun 2019.

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2018	2019			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2019 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Penduduk	4,2 Juta	4,33 juta	4,35 juta	100,46	4,5 juta	96,66
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,35	6,4	5,63	87,97	7,2	78,19
3	PDRB Perkapita (ADHK)	34 juta	35 juta	36 juta	102,85	44 juta	81,82
4	PDRB Perkapita Nominal (ADHB)	50 juta	53 juta	58 juta	109,43	66 juta	87,88
5	Inflasi	3,13	3,50	2,70	129,62	3,00	111,11
6	Tingkat Kemiskinan (%)	3,91	3,85	3,79	101,58	1,00	37,9
7	Jumlah Penduduk Miskin	171,76	166,91	163,85	101,87	42,00	390,12
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,4	1,28	1,52	84,21	0,90	59,21
9	Gini Ratio	0,36	0,35	0,37	105,71	0,25	67,56
10	IPM	74,46	75,07	74,77	99,60	80	93,46
11	Investasi	18	19,22	7,63	39,69	28,10	27,15
12	Jumlah Ekspor	547,711	572,712	137,73	24,05	684,662	20,12

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 (data diolah B.organisasi Setda Prov.Bali)

1.1 Jumlah Penduduk Provinsi Bali

Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda Kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Secara geografis, Bali terletak di 8°25'23" Lintang Selatan dan 115°14'55" Bujur Timur yang



membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain. Gunung Agung adalah titik tertinggi di Bali setinggi 3.148 m. Gunung berapi ini terakhir meletus pada Maret 1963. Gunung Batur juga salah satu gunung yang ada di Bali. Sekitar 30.000 tahun yang lalu, Gunung Batur meletus dan menghasilkan bencana yang dahsyat di bumi. Berbeda dengan di bagian utara, bagian selatan Bali adalah dataran rendah yang dialiri sungai-sungai.

Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yaitu Gunung Batur dan Gunung Agung serta gunung yang tidak berapi, yaitu Gunung Merbuk, Gunung Patas dan Gunung Seraya. Adanya pegunungan tersebut menyebabkan Daerah Bali secara Geografis terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang tidak sama yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Kemiringan lahan Pulau Bali terdiri dari lahan datar (0-2%) seluas 122.652 ha, lahan bergelombang (2-15%) seluas 118.339 ha, lahan curam (15-40%) seluas 190.486 ha dan lahan sangat curam (>40%) seluas 132.189 ha. Provinsi Bali memiliki 4 (empat) buah danau yang berlokasi di daerah pegunungan, yaitu Danau Beratan atau Bedugul, Buyan, Tamblingan, dan Batur. Alam Bali yang indah menjadikan pulau Bali terkenal sebagai daerah wisata.

Menurut Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 jumlah penduduk di Provinsi Bali pada 2019 mencapai 4,36 juta jiwa atau hanya sekitar 1,63% dari total penduduk Indonesia sebanyak 267 juta jiwa. Adapun jumlah penduduk laki-laki 2,19 juta jiwa dan perempuan 2,17 juta jiwa.

Sementara penduduk Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 5,15 juta jiwa yang terdiri atas 2,55 juta jiwa laki-laki dan 2,63 juta perempuan. Sedangkan jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 5,4 juta jiwa, terdiri dari 2,69 juta laki-laki dan 2,73 jiwa perempuan.

1.2 Laju Perekonomian Provinsi Bali



Gambar 3.1 Perekonomian Povinsi Bali

Kinerja ekonomi bali pada tahun 2019 tercatat tumbuh 5,63 persen, melamban dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 yang mencatatkan angka 6,33 persen. Struktur ekonomi bali dari sisi lapangan usaha pada tahun 2019 masih didominasi oleh katagori I (penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum) dengan kontribusi sebesar 23,26 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yaitu sebesar 47,96 persen.

Ekonomi Bali triwulan IV-2019 (y-on-y) tercatat tumbuh 5,51 persen atau mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh 7,59 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) yang tercatat tumbuh 11,95 persen. Sementara itu bila dilihat dari sisi pengeluaran penunjang utama pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2019 yakni Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) tercatat tumbuh sebesar 10,4 persen.

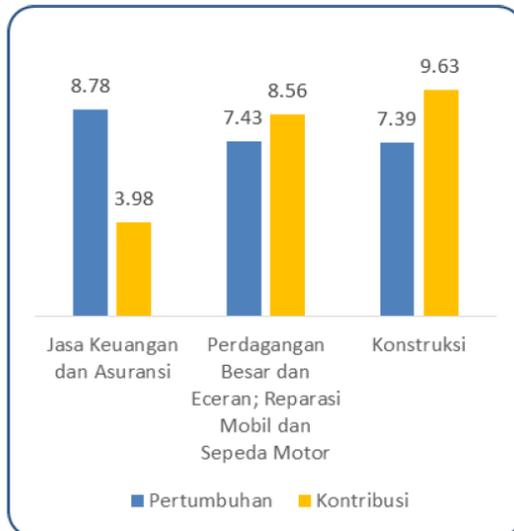
Total perekonomian Bali pada tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (adhb) tercatat sebesar Rp. 252,60 triliun, sementara PDRB atas dasar harga konstan (adhk) tercatat sebesar Rp. 162,78 triliun. Dengan proyeksi jumlah penduduk Bali pada tahun 2019 sebesar 4,34 juta jiwa, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mencapai 58,24 juta rupiah.

Ekonomi Bali selama tahun 2019 (c-to-c) tumbuh 5,63 persen. Hampir semua lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan, kecuali Kategori B (Pertambangan dan Penggalian) yang tercatat tumbuh negatif, yakni -1,23 persen. Pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh Kategori K (Jasa Keuangan dan

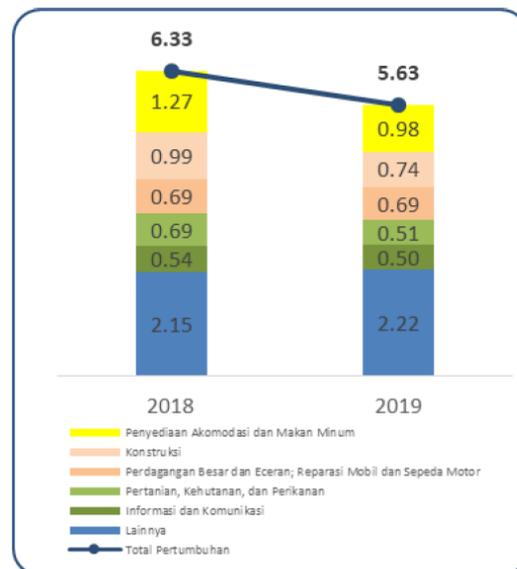


Asuransi) yang tumbuh 8,78 persen. Selanjutnya diikuti oleh Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) yang tercatat tumbuh sebesar 7,43 persen dan Kategori F (Konstruksi) sebesar 7,39 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2019, Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) tercatat menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan menyumbang 0,98 persen. Hal ini terbilang wajar mengingat perekonomian Bali utamanya masih bergerak di sektor pariwisata yang memiliki kaitan erat dengan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Sumber pertumbuhan berikutnya berasal dari Kategori F (Konstruksi) sebesar 0,74 persen, Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) sebesar 0,69 persen, Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) sebesar 0,51 persen dan Kategori J (Informasi dan Komunikasi) sebesar 0,50 persen. Sedangkan gabungan dari 12 kategori lainnya tercatat memberi sumbangan sebesar 2,22 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2019.

Grafik 3.1
Kontribusi 3 (Tiga) Lapangan Usaha Dengan Pertumbuhan Tertinggi pada PDRB Bali menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 (persen)



Grafik 3.2
Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2019 (persen)



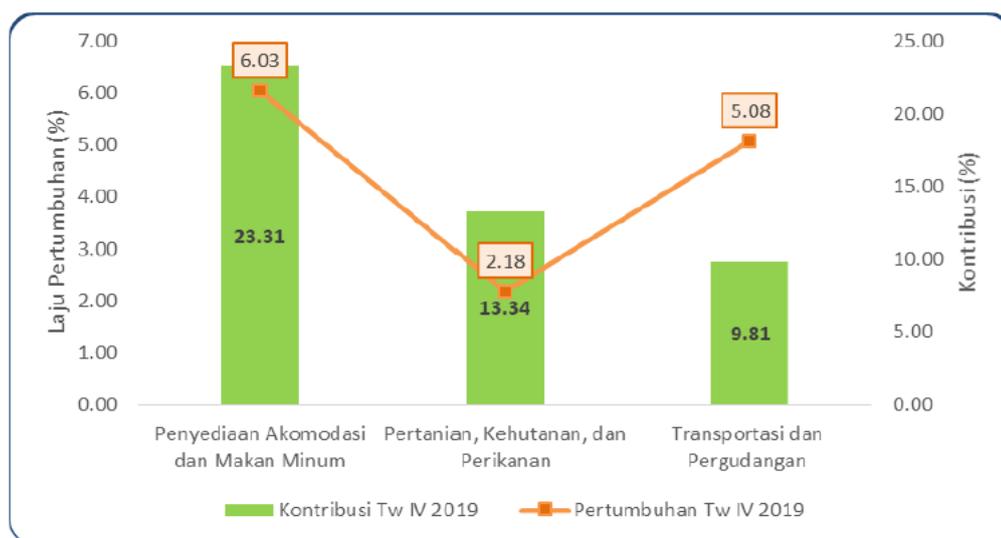
Sumber :BPS Prov.Bali, Tahun 2019 (Data diolah B.Organisasi)

Ekonomi Bali pada triwulan IV-2019 tumbuh 5,51 persen bila dibandingkan dengan triwulan IV-2018 (y-on-y). Pertumbuhan tersebut didukung oleh semua lapangan usaha yang mencatatkan pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) sebesar 11,95 persen. Selanjutnya diikuti oleh Kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi) yang tercatat tumbuh 10,47 persen dan Kategori J (Informasi dan Komunikasi) yang tercatat tumbuh 7,77 persen. Struktur PDRB Bali menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) pada triwulan IV-2019 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan kontribusi sebesar 23,31 persen. Diikuti berturut-turut oleh Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) sebesar 13,34 persen dan Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) sebesar 9,81 persen. Kontribusi Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) tercatat terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015, kontribusi dari kategori ini mencapai 14,65 persen kemudian turun menjadi 13,98 persen pada tahun 2017, dan pada tahun 2019 tercatat pada kisaran

13,53 persen. Walaupun mengalami penurunan kontribusi, namun kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) diharapkan masih mampu menjadi salah satu penopang bagi ekonomi Bali. Selain sebagai pendukung bagi keindahan alam Bali, berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) terdapat sekitar 458.430 orang dari total 2.428.679 penduduk yang bekerja di kategori ini pada Agustus 2019 (atau sekitar 18,88 persen). Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) tercatat sebagai kategori dengan kontribusi terbesar ketiga, mengalami pertumbuhan sebesar 5,08 persen secara y-on-y. Kinerja kategori ini melambat dibandingkan triwulan IV 2018 yang tercatat tumbuh sebesar 8,80 persen. Pada triwulan IV 2018, kategori ini tumbuh tinggi dipicu oleh event IMF-WB Annual Meeting. Jumlah penumpang internasional yang berangkat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai pada triwulan IV 2019 hanya meningkat 9,19 persen jika dibandingkan triwulan IV 2018. Sedangkan peningkatan jumlah penumpang di keberangkatan internasional pada triwulan IV 2018 dibandingkan triwulan IV 2017 tercatat sebesar 36,28 persen. Tidak adanya event besar sebagaimana pada triwulan IV 2018, menjadi salah satu penyebab melambatnya kinerja pada kategori H (Transportasi dan Pergudangan) pada tahun 2019.

Grafik 3.3

Laju Pertumbuhan (tiga) lapangan usaha dengan Kontribusi terbesar terhadap PDRB Triwulan IV-2019 Provinsi Bali



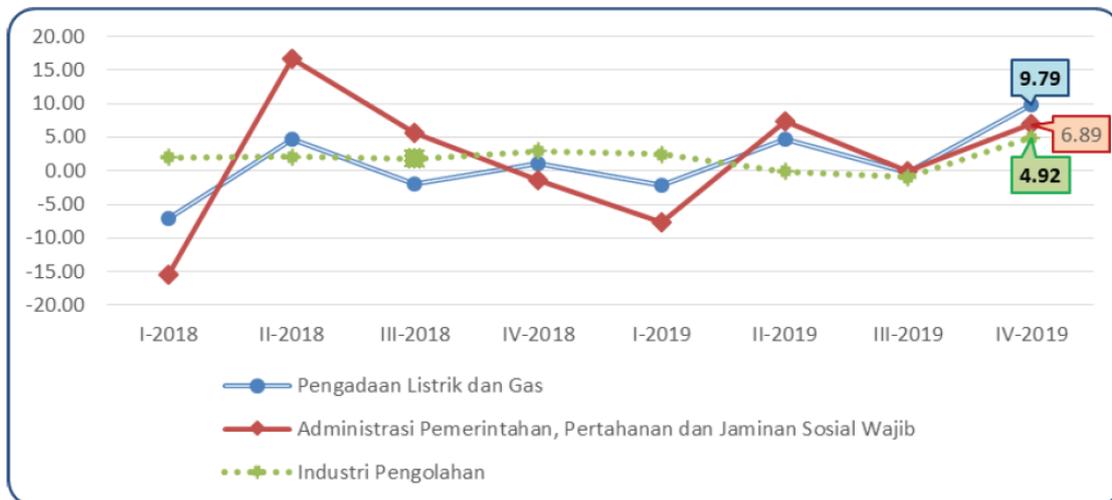


Sumber :BPS Provinsi Bali, Tahun 2019 (diolah B.organisasi)

Ekonomi Bali triwulan IV-2019 jika dibandingkan triwulan III-2019 (q-to-q) mencatatkan angka pertumbuhan sebesar 0,77 persen. Sebagian besar lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif (13 dari 17 lapangan usaha). Pertumbuhan tertinggi tercatat pada Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas), yakni sebesar 9,79 persen. Diikuti Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) yang tercatat tumbuh 6,89 persen serta Kategori C (Industri Pengolahan) yang tercatat tumbuh 4,92 persen. Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi secara (q-to-q) sejalan dengan data dari PT PLN Wilayah Bali.

Konsumsi listrik masyarakat Bali tercatat meningkat, tercermin dari peningkatan jumlah KWH listrik terjual (17,52 persen) dan jumlah pelanggan (1,37 persen). Nilai KWH listrik terjual meningkat pada seluruh golongan konsumen, mulai dari kategori sosial, residensial, bisnis, industri, publik sampai multiguna. Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib), yang pada triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan negatif, pada triwulan IV-2019 tercatat tumbuh sebesar 6,89 persen. Mendekati akhir periode anggaran, realisasi belanja institusi pemerintahan mengalami peningkatan. Berdasarkan data realisasi belanja pegawai serta penyusutan (dari APBN dan APBD), terjadi peningkatan realisasi sekitar 10,18 persen (q-to-q). Peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada belanja modal pemerintah daerah (APBD) yang meningkat hampir dua kali lipat.

Grafik 3.4
Persentase Pertumbuhan Triwulan III Lapangan Usaha Utama PDRB Provinsi Bali Tahun 2018-2019



Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2019 (diolah B.Organisasi)

Peningkatan pertumbuhan Kategori C (Industri Pengolahan) didukung oleh peningkatan produksi baik pada Industri Besar Sedang (IBS) maupun Industri Mikro Kecil (IMK). Secara q-to-q, produksi IBS tercatat tumbuh sebesar 11,48 persen, begitu juga halnya IMK yang tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 1,90 persen. Produk IMK yang mayoritas merupakan usaha rumah tangga, sebagian besar memang ditujukan untuk konsumsi masyarakat. Selama periode triwulan IV, berlangsung masa liburan natal dan tahun baru (Nataru), serta adanya penyelenggaraan perayaan hari raya keagamaan di Bali seperti (Pagerwesi, Saraswati) dan hari baik untuk mengadakan upacara pernikahan. Hal ini agaknya mendorong peningkatan produksi industri pengolahan. Terkait hal tersebut, tercatat adanya peningkatan permintaan untuk jenis komoditas industri barang galian (sanggah-tempat sembahyang), industri barang dari logam (pisau), dan industri pengolahan lainnya (canang dan banten).

Pertumbuhan negatif justru tercatat pada Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dan kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) yang notabene memiliki kontribusi besar terhadap PDRB Bali. Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi



Mobil dan Sepeda Motor) mencatatkan pertumbuhan negatif paling dalam mencapai -1,17 persen. Sedangkan pada Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) tercatat mengalami pertumbuhan negatif sekitar -0,77 persen. Selain itu, masih terdapat dua kategori lain yang mencatatkan pertumbuhan negatif secara q-to-q, antara lain Kategori L (Real Estate) sekitar -0,14 persen dan Kategori M,N (Jasa Perusahaan) sekitar -0,37 persen. Pertumbuhan negatif pada kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) terkonfirmasi dari data kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang tercatat mengalami penurunan sedalam -9,89 persen dari 1,81 juta kunjungan wisman pada triwulan III 2019 menjadi 1,63 kunjungan wisman pada triwulan IV 2019.

Penurunan ini seiring dengan telah terlewatinya periode peak season kunjungan wisman yang berlangsung pada triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut berdampak negatif pada pertumbuhan Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum). Rata-rata TPK hotel berbintang pada triwulan IV-2019 tercatat mengalami penurunan sedalam -2,24 yaitu dari 64,01 pada triwulan III-2019 menjadi 61,77. Sejalan dengan penurunan rata-rata TPK hotel berbintang, penurunan juga tercatat pada TPK hotel non bintang. Pada triwulan IV-2019 rata-rata TPK hotel non bintang sebesar 35,08, menurun sedalam -2,26 poin dari 37,34 pada triwulan III-2019.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan IV 2019, Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) tercatat menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan menyumbang 0,37 persen. Sumber pertumbuhan berikutnya berasal dari Kategori C (Industri Pengolahan) sebesar 0,30 persen, dan Kategori F (Konstruksi) sebesar 0,09 persen.

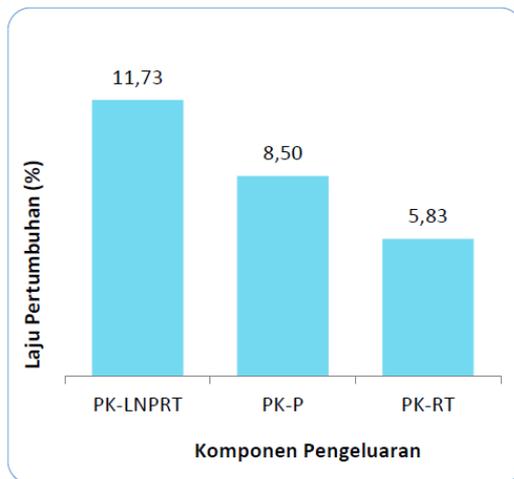
Ekonomi Bali pada Triwulan IV-2019, apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (kumulatif sampai dengan triwulan IV), tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,63 persen. Pertumbuhan tercatat pada hampir semua komponen pengeluaran kecuali Ekspor dan Impor Luar



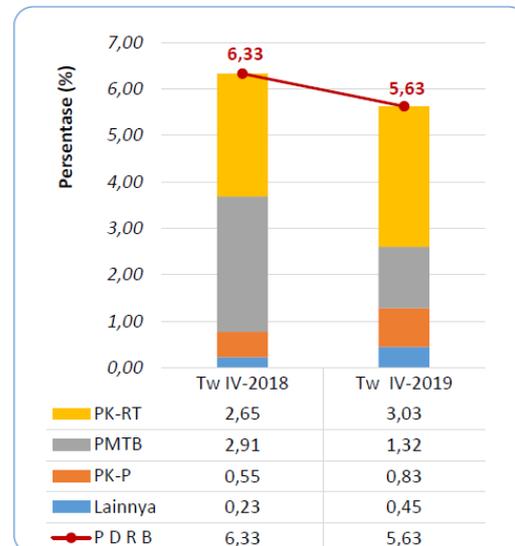
Negeri yang tercatat tumbuh negatif. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit (PK-LNPRT) sebesar 11,73 persen, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 8,5 persen, serta Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,83 persen. Pertumbuhan ekonomi kumulatif Triwulan IV2019 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya tercatat mengalami perlambatan. Pada Triwulan IV-2018 pertumbuhan ekonomi Bali (c-to-c) tercatat sebesar 6,33 persen atau lebih besar 0,7 poin dibandingkan pertumbuhan ekonomi periode ini. Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan (Source of Growth) ekonomi Bali secara c-to-c, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) memberikan andil terbesar terhadap tumbuhnya ekonomi Bali sampai dengan Triwulan IV-2019 dengan sumbangan tercatat sebesar 3,03 persen.

Sumbangan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) ini mengalami peningkatan dari periode yang sama tahun sebelumnya yang telah tercatat sebesar 2,65 persen. Di sisi lain, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang juga memberikan andil cukup besar yakni sebesar 1,32 persen, namun masih lebih kecil dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat mencapai 2,91 persen. Selanjutnya Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan sebesar 0,83 persen, dan sisanya sebesar 0,45 persen disumbangkan oleh komponen lainnya.

Grafik 3.5
Laju Pertumbuhan (%) Tiga Komponen
Pengeluaran Tertinggi Kumulatif
Triwulan IV Tahun 2019



Grafik 3.6
Sumber Pertumbuhan (%) Komponen
Pengeluaran Kumulatif IV Tahun 2019



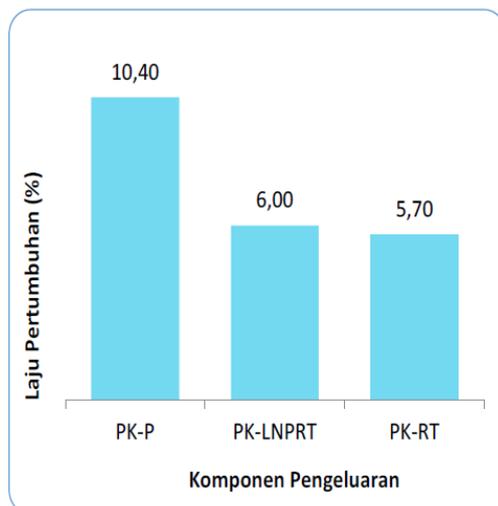
Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2019 (data diolah B.Organisasi)

Ekonomi Bali triwulan IV-2019 dibandingkan dengan triwulan IV-2018 (y-on-y) tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,51 persen. Pertumbuhan tertinggi secara y-on-y tercatat pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 10,4 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit (PK-LNPRT) sebesar 6,00 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,70 persen. Struktur ekonomi Bali pada triwulan IV-2019 dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang tercatat menyumbang sebesar 47,67 persen. Sementara kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri tercatat sebesar 37,35 persen; Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 29,09 persen; Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 12,98 persen. Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit (PK-LNPRT) dan Komponen Perubahan Inventori tercatat memiliki sumbangan relatif kecil yaitu masing-masing sebesar 1,2 persen dan 0,17 persen. Komponen

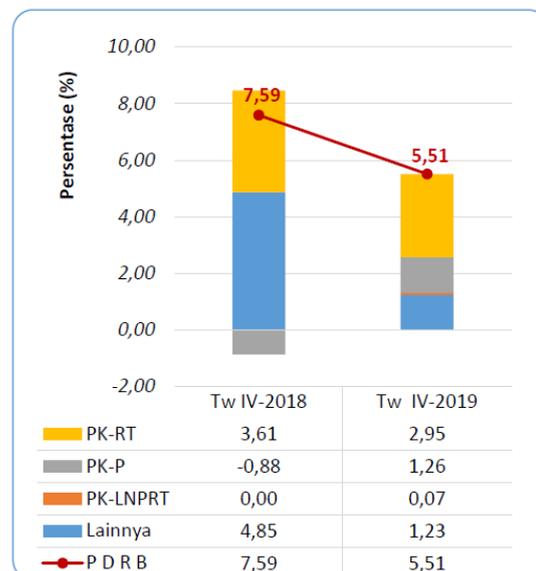
Impor barang dan Jasa Luar Negeri yang merupakan komponen pengurang dalam struktur ekonomi, pada triwulan ini tercatat berkontribusi sebesar 8,75 persen. Sedangkan Net Ekspor Antar Daerah juga tercatat memiliki kontribusi sebesar -19,7 persen (net impor).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali triwulan IV-2019 (y-on-y), komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) tercatat menjadi komponen penyumbang tertinggi yaitu sebesar 2,95 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 1,26 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 0,07 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi yang berasal dari komponen lainnya tercatat berkontribusi sebesar 1,23 persen.

Grafik 3.7
Laju Pertumbuhan (%) Tiga Komponen
Pengeluaran Tertinggi Triwulan IV
Tahun 2019



Grafik 3.8
Sumber Pertumbuhan (%) Komponen
Pengeluaran Triwulan IV Tahun 2019



Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2019 (data diolah B. Organisasi)



1.3 PDRB Pekapita (ADHK)

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Bali bila dilihat dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali untuk tahun 2019 Kabupaten Bangli menjadi terkecil pendapatan pertahunnya sebesar 4,5 juta, sedangkan terbesar dengan jumlah rata-rata pertahunnya Kabupaten Badung dengan besaran 37, 33 Juta, ini terhat ketimpangan yang sangat besar antara kabupaten satu dan kabupaten lainnya, akan tetapi bila melihat dari data Tahun 2014 s.d 2019 setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali telah mengalami peningkatan secara signifikan, bisa dilihat dari Tabel dibawah ini.

**Tabel 3.2 PDRB Perkapita (ADHK) 2010 (Milyar Rupiah) Tahun 2014 s.d 2019**

Kabupaten/Kota ^a	PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Jembrana	7134.97	7576.31	8027.93	8452.03	8924.88	9421.37
Kab. Tabanan	11908	12644.52	13420.55	14141.72	14951.72	15789.28
Kab. Badung	27458.06	29170.24	31157.37	33052.05	35278.5	37335.77
Kab. Gianyar	14269.42	15168.55	16125.28	17005.12	18030.41	19046.6
Kab. Klungkung	4536.35	4813.39	5115.61	5387.61	5683.75	5992.74
Kab. Bangli	3472.3	3686.1	3916.1	4124.22	4350.92	4588.86
Kab. Karangasem	8482.88	8991.75	9524.23	10006.13	10554.39	11134.8
Kab. Buleleng	17741.75	18818.62	19950.72	21023.6	22204.11	23437.49
Kota Denpasar	26778.59	28422.7	30273.39	32105.35	34168.72	36164.89
Provinsi Bali	121787.57	129126.56	137296.45	144933.31	154109.8	162783.94

Sumber :BPS Provinsi Bali, Tahun 2019 (data diolah B.Organisasi)

1.4 PDRB Perkapita Nominal (ADHB)

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalan



3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Bali bila dilihat dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali untuk tahun 2019 Kabupaten Bangli menjadi terkecil pendapatan pertahunnya sebesar 30,79 juta, sedangkan terbesar dengan jumlah rata-rata pertahunnya Kabupaten Badung mencapai 93,69 Juta, ini terhat ketimpangan yang sangat besar antara kabupaten satu dan kabupaten lainnya, akan tetapi bila melihat dari data Tahun 2014 s.d 2019 setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali telah mengalami peningkatan secara signifikan, bisa dilihat dari Tabel dibawah ini.

Tabel 3.3 PDRB Perkapita Nominal (ADHB) Menurut Provinsi Tahun 2014 s.d 2019

Kabupaten/Kota	PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Jembrana	33432.14	37548.79	40862.31	44070.03	47518.61	50919.08
Kab. Tabanan	34770.2	38991.12	42486.32	46201.84	49917	53590.19
Kab. Badung	61843.84	68833.95	74933.6	81345.41	87985.13	93691.52
Kab. Gianyar	36512.03	40679.34	44261.91	48073.46	52130.78	55803.85
Kab. Klungkung	32474.22	36575.03	40249.11	43885.69	47473.13	50927.41
Kab. Bangli	19799.94	22218.27	24384.4	26551.46	28710.41	30794.27
Kab. Karangasem	26525	29932.05	32645.79	35362.42	38266.39	41060.23
Kab. Buleleng	34804.54	38951.2	42593.62	46387.04	50124.84	53755.77
Kota Denpasar	39613.09	43633.8	47235.52	51226.98	55243.4	58785.29
Provinsi Bali	38099.77	42480.42	46210.7	50167.07	54469.59	58243.48

1.5 Laju Inflasi Bali



Gambar : 3.2 Inflasi Bali

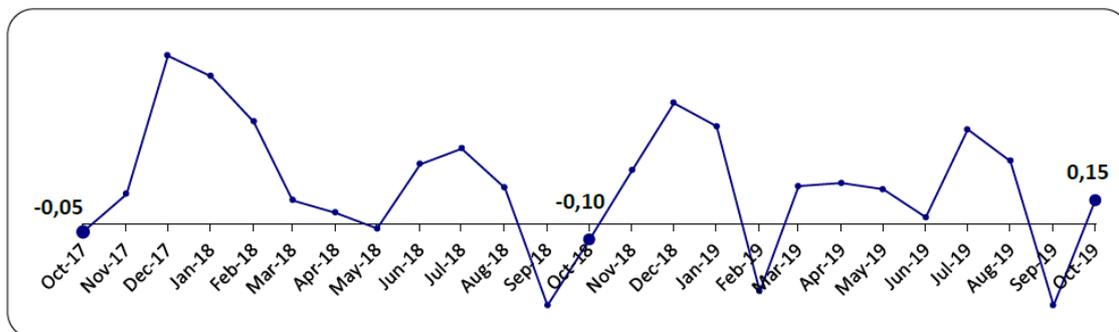
Bulan Oktober 2019 Kota Denpasar tercatat mengalami inflasi setinggi 0,15 persen dengan indeks Harga Konsumen sebesar 133,56. Tingkat inflasi tahun kalender Oktober 2019 tercatat setinggi 1,57 persen sedangkan tingkat inflasi tahun ke

ke tahun (Oktober 2019 terhadap Oktober 2018 atau YoY) tercatat setinggi 2,70 persen Dua kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi (m to m) yaitu kelompok I (bahan makanan) setinggi 1,06 persen dan kelompok III (perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar) setinggi 0,13 persen. Sementara itu, lima kelompok tercatat mengalami deflasi yaitu kelompok V (kesehatan) sedalam -0,45 persen; kelompok IV (sandang) sedalam -0,34 persen; kelompok VII (transpor, komunikasi, dan jasa keuangan) sedalam -0,16 persen; kelompok II (makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau) sedalam -0,06 persen; dan kelompok VI (pendidikan, rekreasi, dan olahraga) sedalam -0,04 persen.

Komoditas yang tercatat memberikan andil atau sumbangan inflasi pada bulan Oktober 2019 antara lain, daging ayam ras, beras, jeruk, salak, pindang tongkol, ikan cakalang, apel, spre, kasur, dan minyak goreng Dari 82 kota IHK, tercatat 43 kota mengalami inflasi dan 39 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Manado (Sulawesi Utara) setinggi 1,22 persen sedangkan inflasi terendah tercatat di Kota Pematang Siantar (Sumatera Utara), Kota Tual (Maluku) dan Kota Ternate (Maluku Utara) masing-masing setinggi 0,01 persen. Sementara itu, deflasi terdalam tercatat di Kota Balikpapan (Kalimantan Timur) sedalam -0,69 persen sedangkan deflasi terdangkal tercatat di Kota Palopo (Sulawesi Selatan) sedalam -0,01 persen. Jika diurutkan dari inflasi tertinggi, maka Denpasar menempati urutan ke-20 dari 43 kota yang mengalami inflasi.

Memasuki bulan Oktober 2019, perkembangan harga berbagai komoditas di Kota Denpasar secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di Kota Denpasar, pada Oktober 2019 terhitung inflasi setinggi 0,15 persen atau peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 133,36 pada September 2019 menjadi 133,56 pada Oktober 2019. Tingkat inflasi tahun kalender Oktober 2019 tercatat setinggi 1,57 persen sedangkan tingkat inflasi tahun ke tahun (Oktober 2019 terhadap Oktober 2018 atau YoY) tercatat setinggi 2,70 persen.

Grafik 3.9
Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Oktober 2017-Oktober 2019



Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2019 (data diolah B. Organisasi)

Pada bulan Oktober 2019, dua kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi (m to m) yaitu kelompok I (bahan makanan) setinggi 1,06 persen dan kelompok III (perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar) setinggi 0,13 persen. Sementara itu, lima kelompok tercatat mengalami deflasi yaitu kelompok V (kesehatan) sedalam -0,45 persen; kelompok IV (sandang) sedalam -0,34 persen; kelompok VII (transpor, komunikasi, dan jasa keuangan) sedalam -0,16 persen; kelompok II (makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau) sedalam -0,06 persen; dan kelompok VI (pendidikan, rekreasi, dan olahraga) sedalam -0,04 persen.



Tabel 3.4
Laju Inflasi Oktober 2019, Tahun Kalender 2019 dan Oktober 2019 terhadap Oktober 2018 Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2018	IHK Oktober 2019	Laju Inflasi Oktober 2019*)	Laju Inflasi Tahun Kalender 2019**)	Laju Inflasi Tahun ke Tahun 2019***)
1. Bahan Makanan	146,16	145,44	1,06	-0,49	2,62
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	139,93	144,97	-0,06	3,60	3,86
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	124,60	125,79	0,13	0,96	1,44
4. Sandang	115,12	118,52	-0,34	2,95	3,08
5. Kesehatan	128,48	131,16	-0,45	2,09	1,95
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	126,76	134,93	-0,04	6,45	7,20
7. Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	128,38	128,33	-0,16	-0,04	1,46
Umum	131,50	133,56	0,15	1,57	2,70

Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2019 (data diolah B. Organisasi)

Komoditas yang tercatat mengalami peningkatan harga atau memberikan sumbangan inflasi pada bulan Oktober 2019 antara lain, daging ayam ras, beras, jeruk, salak, pindang tongkol, ikan cakalang, apel, spreng, kasur, dan minyak goreng. Sementara itu, komoditas yang tercatat menahan laju inflasi antara lain, cabai rawit, tarif angkutan udara, sampo, baju kaos berkerah, pasta gigi, air kemasan, buah pir, tomat sayur, mesin cuci, dan bawang putih.

Penyumbang terbesar inflasi pada bulan Oktober 2019 yaitu kelompok I (bahan makanan) dengan andil inflasi sebesar 0,2041 persen; dan kelompok III (perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar) dengan andil inflasi sebesar 0,0326 persen. Sementara itu, kelompok pengeluaran yang menahan laju inflasi yaitu kelompok VI (pendidikan, rekreasi, dan olahraga) dengan andil deflasi sebesar -0,0036 persen; kelompok II (makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau) dengan andil deflasi sebesar -0,0105 persen; kelompok IV (sandang) dengan andil deflasi sebesar -0,0168 persen; kelompok V (kesehatan) dengan andil deflasi sebesar -0,0268 persen; serta kelompok VII (transpor, komunikasi, dan jasa keuangan) dengan andil deflasi sebesar -0,0303 persen.

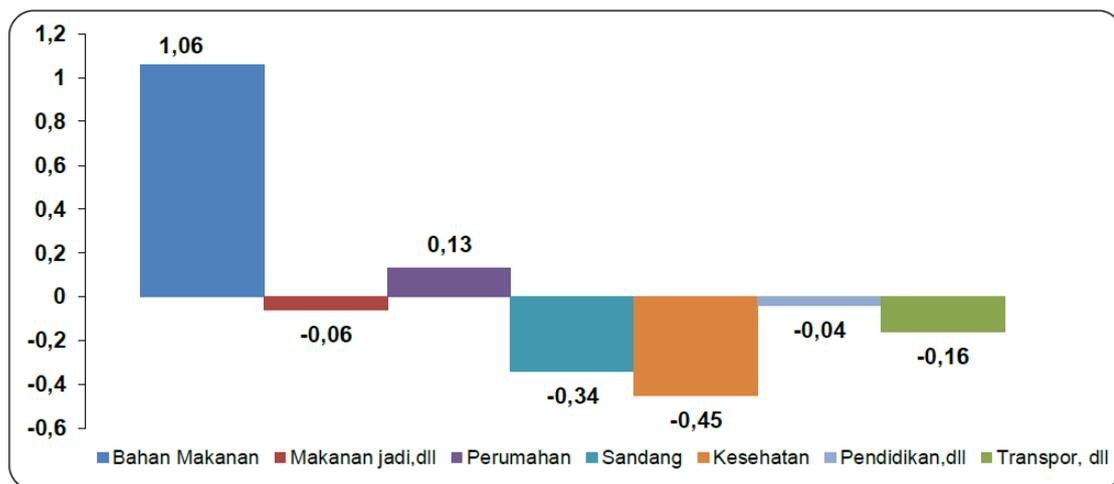
Tabel 3.5
Sumbangan (Andil) Inflasi/Deflasi Menurut Kelompok Pengeluaran
Kota Denpasar 2019

Kelompok Pengeluaran	Andil Inflasi
1. Bahan Makanan	0,2041
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	-0,0105
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	0,0326
4. Sandang	-0,0168
5. Kesehatan	-0,0268
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	-0,0036
7. Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,0303
Umum	0,1487

Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2019 (data diolah B.Organisasi)

Grafik 3.10

Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar Oktober 2019



Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2019 (data diolah B.Organisasi)

Sampai dengan bulan Oktober 2019, diperoleh hitungan inflasi tahun kalender Kota Denpasar setinggi 1,57 persen. Laju inflasi tahun ke tahun (Oktober 2019 terhadap Oktober 2018 atau YoY) tercatat setinggi 2,70 persen. Jika dilihat tiga tahun sebelumnya, maka inflasi tahun kalender bulan Oktober Kota Denpasar berturut-turut setinggi 1,96 persen (2016); 2,01 persen (2017); serta 2,26 persen (2018). Sementara itu, inflasi tahunan (YoY) Oktober tercatat setinggi 3,33 persen pada tahun 2016; 3,00 persen pada tahun 2017; serta 3,56 persen pada tahun 2018.

Tabel 3.6
Inflasi Bulanan, Tahun Kalender dan Tahunan
Kota Denpasar 2016-2019

Inflasi	2016	2017	2018	2019
1. Oktober	-0,19	-0,05	-0,10	0,15
2. Kalender Oktober	1,96	2,01	2,26	1,57
3. Tahunan (YoY) Oktober	3,33	3,00	3,56	2,70

1.6 Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali dan

1.7 Jumlah Kemiskinan Provinsi Bali

Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis baik di tingkat nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Tingkat kemiskinan Bali terus mengalami penurunan.



Gambar 3.3 Kujungan Gubernur Bali ke Penduduk Miskin

jumlah penduduk miskin pada September 2018 yang tercatat sebanyak 168,34 ribu orang. Selama periode September 2018 – Maret 2019, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat turun dari 3,36 persen pada September 2018 menjadi 3,29 persen pada Maret 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan juga mengalami penurunan dari 5,08 persen pada September 2018 menjadi 4,88 persen pada Maret 2019.

Persentase penduduk miskin di Bali pada maret 2019 tercatat sebesar 3,79 persen, atau turun sebesar 0,12 poin persen terhadap September 2018. Jumlah penduduk miskin di Bali pada bulan Maret 2019 tercatat sebanyak 163,85 ribu orang. Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 4,49 ribu orang dibandingkan



Selama periode September 2018 – Maret 2019, Garis Kemiskinan tercatat naik sebesar 3,13 persen, yaitu dari Rp 388.451,- per kapita per bulan pada September 2018 menjadi Rp 400.624,- per kapita per bulan pada Maret 2019. Selama periode September 2018 – Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tercatat mengalami kenaikan sebesar 0,018 poin persen, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan sebesar -0,001 poin persen selama periode September 2018 – Maret 2019, ketimpangan pendapatan di Bali yang digambarkan dengan Gini ratio mengalami kenaikan sebesar 0,002 poin persen.

Jumlah penduduk miskin di Bali pada Maret 2019 tercatat sebanyak 163,85 ribu orang. Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 4,49 ribu orang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2018 yang tercatat berjumlah 168,34 ribu orang. Secara persentase, penduduk miskin di Bali tercatat sebesar 3,79 persen. Nilai persentase ini mengalami penurunan sebesar -0,12 persen jika dibandingkan September 2018 yang tercatat sebesar 3,91 persen.

Menurut daerah tempat tinggal, pada periode September 2018 - Maret 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebanyak 97,98 ribu orang. Jumlah ini berkurang sebesar -0,47 ribu orang dibandingkan dengan bulan September 2018 yang mencapai 98,45 ribu orang. Demikian juga jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 69,89 ribu orang pada September 2018 menjadi 65,87 ribu orang pada Maret 2019, atau tercatat berkurang sebanyak -4,02 ribu orang. Secara persentase, penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan tercatat mengalami penurunan. Di daerah perkotaan pada September 2018 tercatat sebesar 3,36 persen, turun menjadi 3,29 persen pada Maret 2019. Demikian juga persentase penduduk miskin di daerah perdesaan tercatat turun dari 5,08 persen pada September 2018 menjadi 4,88 persen pada Maret 2019.



Tabel 3.7
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah, September 2018-Maret 2019

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
September 2018	98,45	3,36
Maret 2019	97,98	3,29
Perdesaan		
September 2018	69,89	5,08
Maret 2019	65,87	4,88
Kota + Desa		
September 2018	168,34	3,91
Maret 2019	163,85	3,79

Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2019 (Data diolah B.Organisasi)

Pada September 2015, jumlah penduduk miskin di Bali tercatat sebanyak 218,79 ribu orang atau 5,25 persen. Jumlah ini merupakan yang tertinggi selama periode Maret 2015 – Maret 2019. Dalam kurun waktu lima tahun, jumlah penduduk miskin di Bali cenderung mengalami penurunan. Pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin di Bali tercatat sebanyak 163,85 ribu orang atau 3,79 persen. Persentase kemiskinan bulan Maret 2019 merupakan persentase kemiskinan terendah sepanjang lima tahun terakhir.

Grafik 3.11
Perkembangan Kemiskinan di Bali
Maret 2015-Maret 2019



Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2019 (data diolah B. Organisasi)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran per kapita dibawah Garis Kemiskinan. Pada bulan Maret 2019, Garis Kemiskinan Provinsi Bali tercatat sebesar Rp 400.624,- per kapita per bulan. Nilai ini tercatat mengalami peningkatan sebesar 3,13 persen jika dibandingkan Garis Kemiskinan pada bulan September 2018 yang mencapai Rp 388.451,- per kapita per bulan. Menurut komponennya, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) di perkotaan pada Maret 2019 sebesar 68,19 persen. Sedangkan sumbangan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKNM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) hanya sebesar 31,81 persen. Sementara itu di perdesaan, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK)



pada Maret 2019 tercatat sebesar 70,44 persen. Sedangkan Garis kemiskinan Bukan Makanan (GKNM) tercatat memberikan sumbangan sebesar 29,56 persen terhadap Garis Kemiskinan (GK).

Tabel 3.8
Garis Kemiskinan dan Perubahan Menurut Daerah
September 2018- Maret 2019

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
September 2018	268.910	125.079	393.989
(% terhadap total)	(68,25)	(31,75)	(100)
Maret 2019	278.769	130.026	408.795
(% terhadap total)	(68,19)	(31,81)	(100)
Perubahan Sept '18 - Mar '19 (%)	3,67	3,96	3,76
Perdesaan			
September 2018	267.059	109.674	376.733
(% terhadap total)	(70,89)	(29,11)	(100)
Maret 2019	269.879	113.240	383.118
(% terhadap total)	(70,44)	(29,56)	(100)
Perubahan Sept '18 - Mar '19 (%)	1,06	3,25	1,69
Kota + Desa			
September 2018	268.275	120.176	388.451
(% terhadap total)	(69,06)	(30,94)	(100)
Maret 2019	275.834	124.790	400.624
(% terhadap total)	(68,85)	(31,15)	(100)
Perubahan Sept '18 - Mar '19 (%)	2,82	3,84	3,13

Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2019 (data diolah B. Organisasi)

Komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan Maret 2019 baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya sama. Adapun komoditas makanan yang berperan dalam pembentukan Garis Kemiskinan di perkotaan antara lain: beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, kue basah, roti, bawang merah, mie instan, gula pasir, serta kopi bubuk dan kopi instan (sachet).

Sedangkan komoditas makanan yang berperan dalam pembentukan Garis Kemiskinan di perdesaan antara lain: beras, rokok kretek filter, daging



ayam ras, telur ayam ras, roti, kue basah, bawang merah, gula pasir, mie instan, serta kopi bubuk dan kopi instan (sachet). Pada komoditas bukan makanan, komoditas yang berperan dalam pembentukan Garis Kemiskinan di perkotaan antara lain: perumahan, bensin, listrik, upacara agama atau adat lainnya, dan pendidikan. Adapun komoditi bukan makanan yang berperan dalam pembentukan Garis Kemiskinan di perdesaan antara lain: perumahan, bensin, upacara agama atau adat lainnya, listrik, dan kayu bakar.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penurunan tingkat kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Pada periode September 2018 - Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) mengalami peningkatan, namun berbanding terbalik dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) yang mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,535, mengalami kenaikan dibandingkan bulan September 2018 yang mencapai 0,517. Sementara itu, Indeks Keparahannya Kemiskinan tercatat turun dari 0,115 menjadi 0,114 pada periode yang sama.

Tabel 3.9
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di Bali
Menurut Daerah, September 2018-Maret 2019

Periode	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)			
September 2018	0,444	0,672	0,517
Maret 2019	0,487	0,641	0,535
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2)			
September 2018	0,097	0,153	0,115
Maret 2019	0,107	0,130	0,114

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2019 di perkotaan lebih rendah dibandingkan di daerah perdesaan. Pada Maret 2019, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan tercatat sebesar 0,487 lebih rendah dibandingkan daerah perdesaan yang mencapai 0,641. Begitu juga dengan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada Maret 2019 di perkotaan tercatat sebesar 0,107 lebih rendah dibandingkan di daerah perdesaan yang tercatat sebesar 0,130. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di daerah perkotaan mendekati Garis Kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di perkotaan lebih kecil atau cenderung homogen.

1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali



Agustus 2019, jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Bali tercatat sebanyak 3.338.767 orang (76,99 persen dari total penduduk). Dari penduduk usia kerja tersebut, 73,87 persen tercatat sebagai angkatan kerja (2.466.230 orang) dan 26,13 persen (872.537 orang) tercatat sebagai bukan angkatan kerja

Angkatan kerja di Provinsi Bali pada Agustus 2019 turun sedalam -2,34 persen (59.125 orang) dibandingkan dengan Agustus 2018. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah penduduk bekerja sedalam -2,50 persen (62.191 orang). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Bali pada Agustus 2019 tercatat sebesar 73,87 persen, turun sedalam -2,91 poin dibandingkan dengan Agustus 2018 yang tercatat sebesar 76,78 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali pada Agustus 2019 tercatat sebesar 1,52 persen, meningkat setinggi 0,15 poin dibandingkan TPT Agustus 2018 yang tercatat sebesar 1,37 persen. Pekerja formal pada Agustus 2019 tercatat sebanyak 1.219.297 orang (50,20 persen). Sementara pekerja



informal tercatat sebanyak 1.209.382 orang (49,80 persen). Sementara pada Agustus 2018, pekerja formal tercatat sebanyak 1.254.577 orang (50,37 persen), sedangkan pekerja informal tercatat sebanyak 1.236.293 orang (49,63).

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2019 menunjukkan adanya penurunan jumlah Angkatan Kerja bila dibandingkan dengan Agustus 2018. Pada Agustus 2019, sebanyak 3.338.767 orang tercatat sebagai penduduk usia kerja (penduduk berusia 15 tahun ke atas). Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.466.230 orang tercatat sebagai Angkatan Kerja (penduduk usia kerja yang siap bekerja atau membuka usaha) dan sebanyak 872.537 orang tercatat sebagai Bukan Angkatan Kerja (penduduk usia kerja dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya). Dari total Angkatan Kerja, sebanyak 2.428.679 orang (98,48 persen) tercatat sebagai penduduk bekerja sedangkan sebanyak 37.551 orang (1,52 persen) tercatat sebagai penduduk yang menganggur. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2019 tercatat sebesar 73,87 persen, turun sedalam -2,91 poin dibandingkan dengan TPAK Agustus 2018 yang tercatat sebesar 76,78 persen. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2019 yang tercatat sebesar 1,52 persen, meningkat setinggi 0,15 poin dibandingkan TPT Agustus 2018 yang tercatat sebesar 1,37 persen.

Tabel 3.10
Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama
Tahun 2018-2019

Kegiatan Utama	Agustus 2017	Agustus 2018	Agustus 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Penduduk Usia Kerja	3.235.563	3.288.908	3.338.767
2. Angkatan Kerja	2.434.450	2.525.355	2.466.230
a. Bekerja	2.398.307	2.490.870	2.428.679
b. Menganggur	36.143	34.485	37.551
3. Bukan Angkatan Kerja	801.113	763.553	872.537
4. TPAK (%)	75,24	76,78	73,87
5. TPT (%)	1,48	1,37	1,52
6. Pekerja Tidak Penuh Waktu (<35 Jam)	550.541	583.676	605.581

Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2019 (data diolah B.Organisasi)



Penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Agustus 2019 di Provinsi Bali, didominasi oleh lapangan pekerjaan kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) yang tercatat sebanyak 19,43 persen (471.799 orang). Meskipun lapangan pekerjaan ini tercatat menyerap tenaga kerja dengan jumlah terbanyak, tetapi jumlah penduduk yang bekerja di lapangan pekerjaan ini menurun sedalam -6,03 persen dibandingkan Agustus 2018 yang tercatat sebanyak 502.064 orang. Selanjutnya, lapangan pekerjaan kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) pada Agustus 2019 tercatat menyerap tenaga kerja sebanyak 458.430 orang (18,88 persen).

Jumlah penduduk yang bekerja di lapangan pekerjaan ini menurun sedalam -8,54 persen dibandingkan Agustus 2018 yang tercatat sebanyak 501.235 orang. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja di lapangan pekerjaan kategori C (Industri Pengolahan) tercatat sebanyak 364.397 orang (15,00 persen). Penduduk yang bekerja pada lapangan pekerjaan ini menurun sedalam -0,08 persen dibandingkan Agustus 2018 yang tercatat sebanyak 364.685 orang. Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh penduduk yang bekerja pada lapangan pekerjaan kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yang tercatat meningkat setinggi 0,04 persen dibandingkan Agustus 2018. Lapangan pekerjaan ini menyerap tenaga kerja sebanyak 318.711 orang (13,12 persen) pada Agustus 2019.



Tabel 3.11
Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2018-2019

Lapangan Pekerjaan	Agustus 2018	Agustus 2019
(1)	(2)	(3)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	501.235	458.430
B. Pertambangan dan Penggalian	6.073	9.627
C. Industri Pengolahan	364.685	364.397
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5.989	5.586
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5.754	11.759
F. Konstruksi	158.190	161.512
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	502.064	471.799
H. Transportasi dan Pergudangan	72.194	75.851
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	318.574	318.711
J. Informasi dan Komunikasi	7.566	12.252
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	60.987	69.653
L. Real Estat	3.193	4.133
M,N. Jasa Perusahaan	57.901	56.951
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	137.796	123.762
P. Jasa Pendidikan	116.739	98.327
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50.097	53.552
R,S,T,U. Informasi dan Komunikasi; Real Estate; Jasa Lainnya	121.833	132.377
JUMLAH	2.490.870	2.428.679

Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2019 (data diolah B. Organisasi)

Dari seluruh penduduk yang bekerja pada Agustus 2019, status pekerjaan utama didominasi oleh mereka yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai yang tercatat sebanyak 1.128.042 orang (46,45 persen). Selanjutnya, mereka yang berstatus berusaha sendiri tercatat sebanyak 402.677 orang (16,58 persen), dan mereka yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/ pekerja keluarga/tidak dibayar tercatat sebanyak 366.243 orang (15,08 persen). Pekerja dengan status pekerja keluarga/tidak dibayar tercatat sebanyak 270.034 orang (11,12 persen).



Pada Agustus 2019, jumlah pekerja formal tercatat sebanyak 1.219.297 orang (50,20 persen) sedangkan jumlah pekerja informal tercatat sebanyak 1.209.382 orang (49,80 persen). Jika dibandingkan dengan Agustus 2018, jumlah pekerja formal turun dari 1.254.577 orang menjadi 1.219.297 orang pada Agustus 2019. Sementara itu, jumlah pekerja informal turun dari 1.236.293 orang menjadi 1.209.382 orang pada Agustus 2019.

Tabel 3.12
Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status pekerjaan Utama Tahun 2018-2019

Status Pekerjaan Utama	Agustus 2018	Agustus 2019
(1)	(2)	(3)
PEKERJA FORMAL		
Buruh/karyawan/pegawai	1.144.726	1.128.042
Berusaha dibantu buruh tetap	109.851	91.255
TOTAL PEKERJA FORMAL	1.254.577	1.219.297
PEKERJA INFORMAL		
Berusaha Sendiri	349.431	402.677
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	406.506	366.243
Pekerja bebas	186.976	170.428
Pekerja tak dibayar	293.380	270.034
TOTAL PEKERJA INFORMAL	1.236.293	1.209.382
JUMLAH	2.490.870	2.428.679

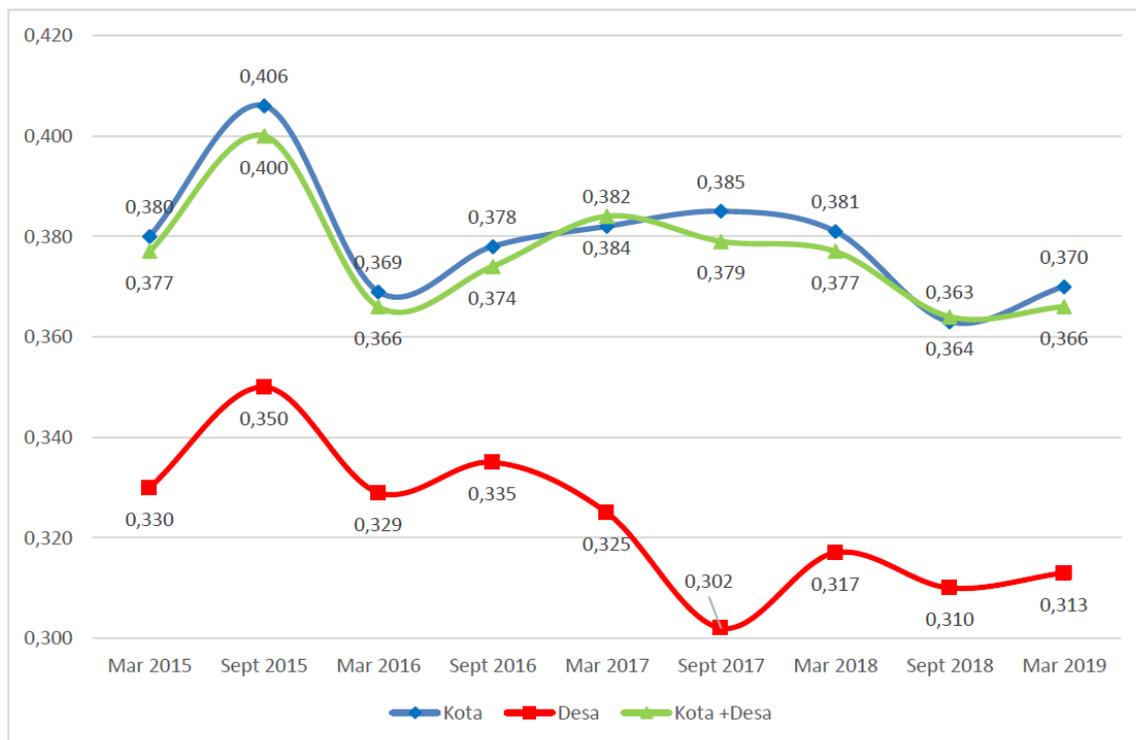
Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2019 (data diolah B. Organisasi)

1.9 Gini Ratio (Ketimpangan Pendapatan)

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Provinsi Bali pada September 2018 tercatat sebesar 0,364 dan naik menjadi 0,366 pada Maret 2019. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,370. Angka ini naik sebesar 0,007 poin dibanding Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,363. Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio Maret 2019 tercatat sebesar 0,313. Atau naik sebesar 0,003 poin dibanding Gini Ratio

September 2018 yang tercatat sebesar 0,310. Grafik 3.12 menunjukkan perkembangan Gini Ratio di Bali pada periode Maret 2015 sampai dengan Maret 2019.

Grafik 3.12
Perkembangan Gini Ratio di Bali
Maret 2015 – Maret 2019



Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2019 (data diolah B.Organisasi)

1.10 Investasi dan

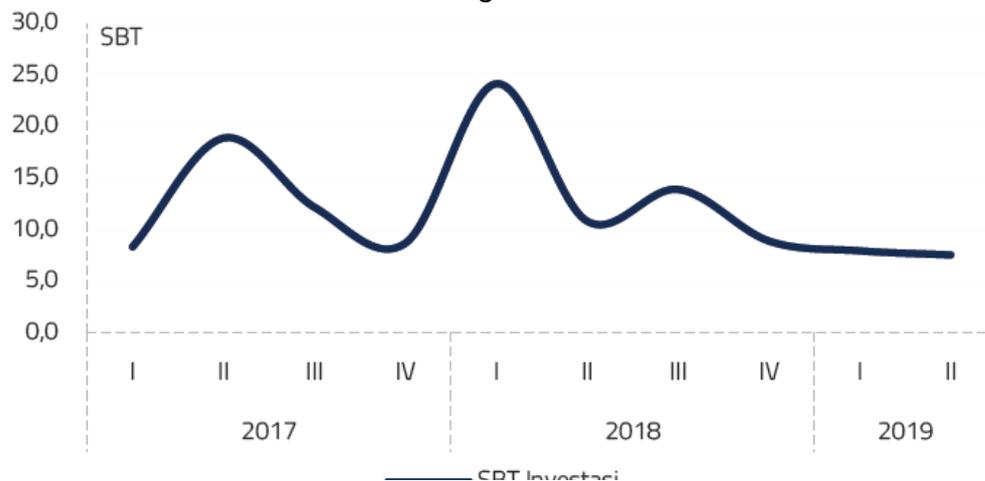
1.11 Jumlah Ekspor

Kinerja komponen investasi pada triwulan II 2019 tercatat lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya. Komponen investasi pada triwulan II 2019 tumbuh 7,63% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan I 2019 yang tumbuh sebesar 8,78% (yoy). Perlambatan kinerja komponen investasi disebabkan oleh masuknya tahun politik dengan adanya pemilihan presiden dan legislatif sehingga mendorong perilaku wait and see pelaku usaha.

Kinerja investasi yang melambat pada triwulan laporan juga terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). Hasil SKDU menunjukkan

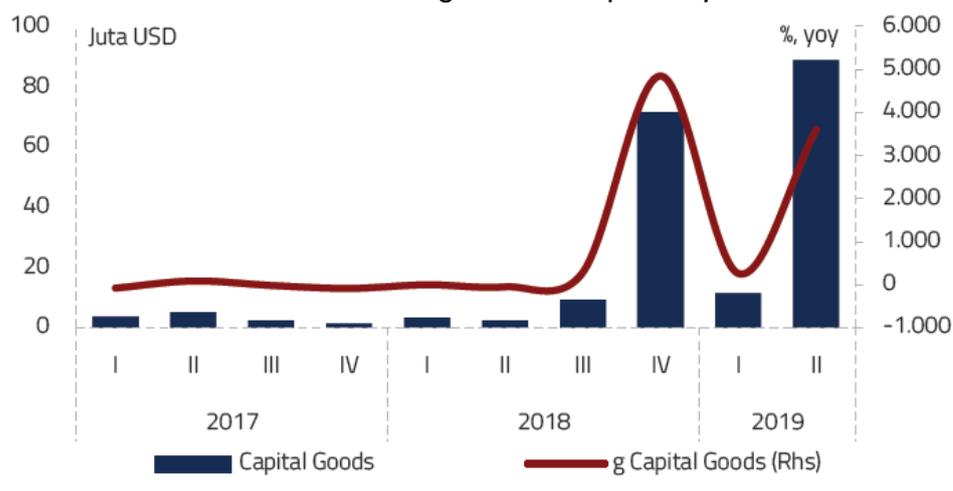
penurunan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) investasi, terutama disumbangkan oleh perlambatan nilai SBT pada sektor utama di Bali yaitu lapangan usaha Perdagangan Hotel dan Restoran (PHR) dan Konstruksi. Disisi lain, nilai impor barang modal pada triwulan II 2019 yang tumbuh lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya.

Grafik 3.13
Perkembangan SBT Investasi SKDU



Sumber : Bank Indonesia, Tahun 2019 (Data diolah B.Organisasi)

Grafik 3.13
Perkembangan Nilai Impor *Capital Goods*

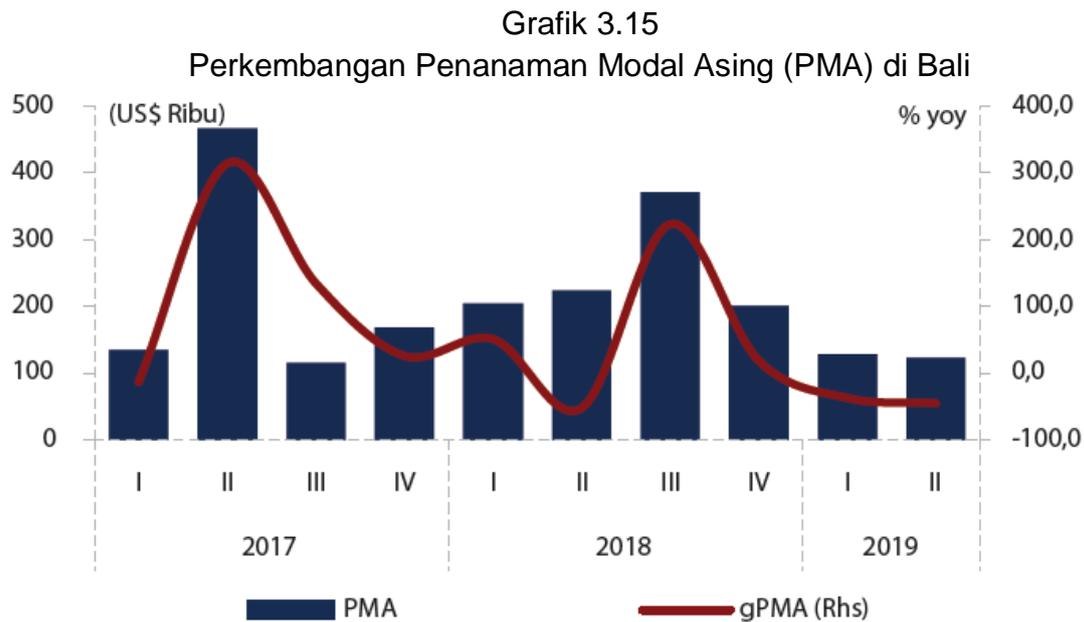


Sumber : Bea dan Cukai, Tahun 2019

Perlambatan kinerja komponen investasi pada triwulan II 2019 sejalan dengan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA), realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan pengadaan semen. Realisasi PMA di Bali pada triwulan laporan mengalami kontraksi semakin dalam dibanding triwulan sebelumnya¹⁴. Sementara itu, realisasi PMDN di Bali pada triwulan laporan tumbuh lebih lambat dibanding triwulan sebelumnya¹⁵. Selain itu, pengadaan semen di Bali pada triwulan II 2019 yang tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya¹⁶ juga mengonfirmasi perlambatan kinerja komponen investasi.



Sumber : Asosiasi Semen Indonesia, Tahun 2019



Sumber : BKPM, data diolah Tahun 2019

Kinerja investasi pada triwulan III 2019 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya. Akselerasi ini didorong oleh pengerjaan proyek infrastruktur dan konstruksi antara lain pengembangan kawasan Nusa Dua, Pelabuhan Benoa dan Celukan Bawang, Shortcut Jalan SingarajaMengwitani, Rapid Exit Taxiway Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan bendungan Sidane. Selain itu, percepatan realisasi belanja modal untuk APBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga berpotensi mendorong kinerja komponen investasi pada triwulan III 2019. Berlanjutnya kebijakan suku bunga kebijakan yang akomodatif dan turunnya suku bunga kredit diharapkan juga mampu mendorong kinerja investasi.

Neraca perdagangan Bali (antar daerah dan luar negeri) pada triwulan II 2019 masih mencatatkan surplus, meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Surplus neraca perdagangan gabungan (luar negeri dan antar daerah) tercatat mengalami tercatat sebesar Rp 1,54 triliun pada triwulan II 2019, meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang surplus Rp 1,52 miliar. Peningkatan surplus neraca perdagangan gabungan bersumber dari peningkatan ekspor luar negeri, sedangkan perdagangan antar daerah mengalami defisit.

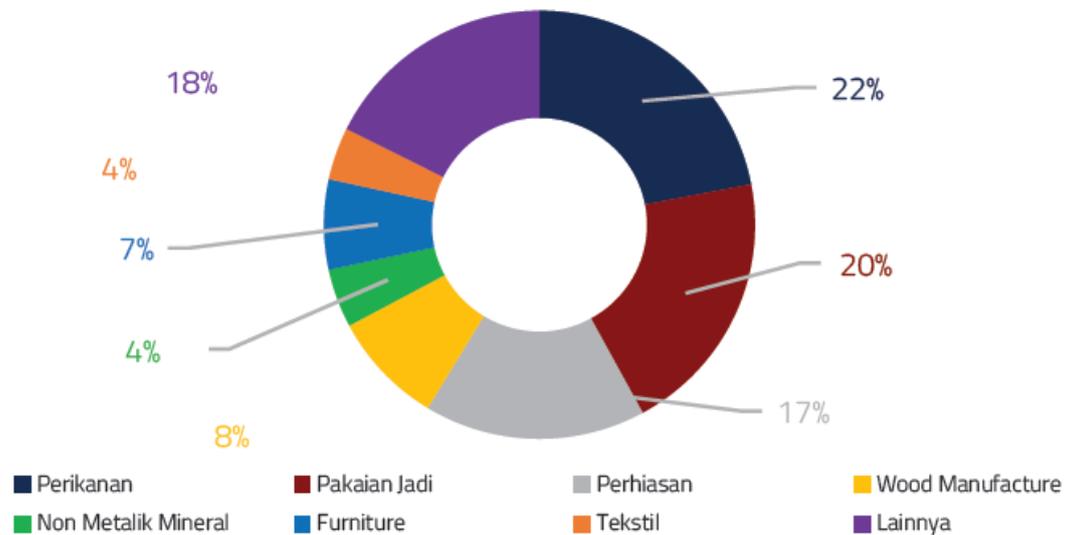


Neraca perdagangan luar negeri Bali masih mencatatkan surplus namun pertumbuhan surplusnya melambat dibanding triwulan sebelumnya. Ekspor luar negeri Bali pada triwulan II 2019 tumbuh lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya. Sejalan dengan itu, impor luar negeri Bali juga tumbuh lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya. Namun penurunan pada impor tidak serendah penurunan pada ekspor.

Defisit neraca perdagangan antar daerah Bali pada triwulan II 2019 meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, neraca perdagangan antar daerah Bali mencatatkan defisit sebesar Rp8,54 triliun, lebih tinggi dibanding triwulan I 2019 yang sebesar Rp8,33 triliun. Peningkatan nilai defisit ini disebabkan oleh penurunan nilai ekspor serta peningkatan nilai impor. Ekspor daerah Bali antara lain dilakukan dengan daerah di Pulau Jawa seperti Banyuwangi yaitu untuk komoditas bawang merah. Sementara itu, Bali melakukan impor beberapa komoditas seperti beras dan cabai merah dari Surabaya dan Banyuwangi.

Kinerja ekspor luar negeri Bali tumbuh melambat pada triwulan laporan, demikian pula impor luar negeri yang juga melambat dibanding triwulan sebelumnya. Ekspor luar negeri Bali tercatat tumbuh -6,01% (yoy) pada triwulan II 2019, lebih rendah dibanding triwulan I 2019 yang tumbuh positif 2,19% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh jumlah kunjungan wisman yang mengalami kontraksi pada triwulan laporan¹⁷. Perlambatan pertumbuhan total ekspor luar negeri Bali yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan ekspor barang¹⁸. Demikian pula, impor luar negeri Bali tumbuh 9,44% (yoy) pada triwulan laporan, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,87% (yoy).

Grafik 3.16
Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama



Sumber Bea dan Cukai, Tahun 2019 (data diolah B.Organisasi)

Ekspor barang Bali mengalami akselerasi pada triwulan laporan dibanding triwulan sebelumnya yang didorong oleh akselerasi kinerja ekspor utama Bali seperti perikanan (pangsa 22%), pakaian jadi (20%), dan perhiasan (17%). Sementara itu terjadi pula sedikit perlambatan pada komoditas tekstil dan electrical machinery. Ekspor tekstil dengan pangsa sebesar 4% tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya. Penurunan tekanan impor barang luar negeri disebabkan oleh melambatnya impor barang konsumsi pada triwulan II 2019/20. Impor barang konsumsi yang melambat terjadi pada komoditas makanan-minuman untuk rumah tangga, barang konsumsi tahan lama, dan barang konsumsi tidak tahan lama. Sementara itu, impor barang konsumsi makanan-minuman olahan dan impor barang konsumsi semi durable mengalami akselerasi dibanding triwulan sebelumnya.

Akselerasi kinerja ekspor barang luar negeri Bali disebabkan oleh membaiknya kinerja ekspor barang Bali ke beberapa negara pasar utama antara lain Jepang, dan Tiongkok. Ekspor barang Bali ke Jepang dan Tiongkok menunjukkan pertumbuhan yang membaik dibanding triwulan sebelumnya. Sementara itu, akselerasi kinerja ekspor luar negeri yang lebih tinggi tertahan

oleh penurunan ekspor barang Bali ke US dan Jepang. Negara-negara pasar utama tersebut menjadi pasar untuk berbagai komoditas barang Bali, dengan rincian sebagai berikut:

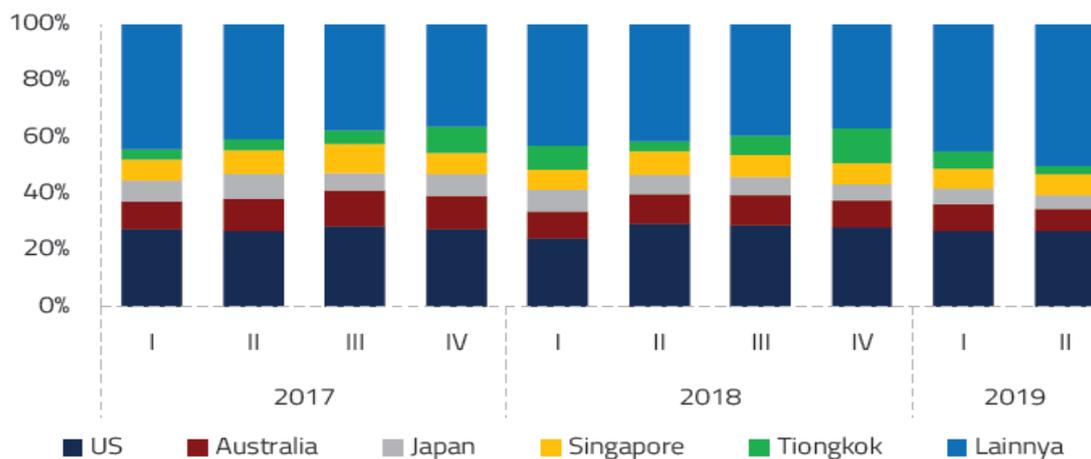
1. Amerika Serikat:

- Komoditas perikanan berupa ikan tuna, ikan lainnya dan kepiting/kerang-kerangan.
- Komoditas industri berupa olahan kayu, tekstil, barang dari logam tidak mulia, makanan olahan (coklat, olahan buah dan sayur), meubel, bahan dari plastik atau damar

2. Australia:

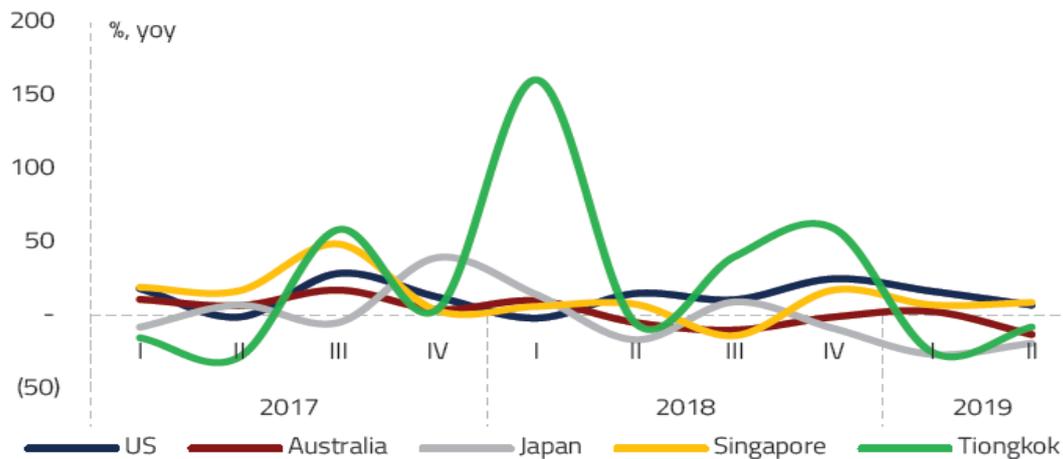
- Komoditas perikanan berupa ikan dan mutiara
- Komoditas hasil industri berupa tekstil, kayu olahan, barang dari logam tidak mulia dan olahan ikan, meubel, alas kaki

Grafik 3.17
Pangsa Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Utama



Sumber : Bea dan Cukai, Tahun 2019 (data diolah B.Organisasi)

Grafik 3.18
Pertumbuhan Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Utama



Sumber : Bea dan Cukai, Tahun 2019 (data diolah B.Organisasi)

3. Tiongkok:

- Komoditas perikanan berupa kepiting, kerang dan ikan kerapu
- Komoditas hasil industri berupa kayu olahan, meubel, barang dari logam dan industri lainnya

Berbeda dengan ekspor barang, kinerja ekspor jasa Bali pada triwulan II 2019 tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya seiring dengan jumlah kedatangan wisman yang melambat. Berdasarkan hasil liason, perlambatan jumlah kunjungan wisman ke Bali dipengaruhi oleh penegakan hukum terhadap praktek zero dollar tourism dan adanya travel advisory dari berbagai negara kepada warga negaranya yang ingin berkunjung ke Indonesia. Selain itu, semakin kompetitifnya daya saing dari negara tujuan wisata tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand juga berpengaruh pada kunjungan wisman ke Bali.

Melambatnya kinerja ekspor jasa Bali terjadi seiring dari melambatnya pertumbuhan kedatangan wisman dari negara-negara pasar utama yang terkonfirmasi dari melambatnya kedatangan penumpang di Bandara Ngurah Rai. Kedatangan wisman Australia sebagai pasar utama (pangsa 21%) melambat pada triwulan laporan. Sementara itu, kedatangan wisman Tiongkok mengalami

kontraksi yang semakin dalam pada triwulan laporan. Kedatangan wisman India yang pada triwulan I 2019 masih tumbuh positif, pada triwulan laporan mengalami kontraksi. Kedatangan wisman yang melambat terkonfirmasi dari data kedatangan penumpang pada pintu kedatangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada triwulan II 2019.

Kinerja ekspor luar negeri Bali pada triwulan III 2019 diperkirakan akan mengalami akselerasi, didorong oleh peningkatan kinerja ekspor jasa dan barang. Meningkatnya kinerja ekspor jasa, didorong oleh membaiknya kinerja pariwisata seiring dengan mulai masuknya periode high season pariwisata. Peningkatan ekspor jasa pada triwulan III 2018 juga didorong oleh pembukaan rute penerbangan langsung baru ke Bali dari beberapa negara²⁸ sehingga mendorong kedatangan wisman ke Bali. Sementara itu, perbaikan kinerja ekonomi negara mitra dagang utama Bali diharapkan mampu mendorong ekspor barang Bali. Salah satu negara mitra dagang utama Bali yang diproyeksi akan mengalami akselerasi pertumbuhan ekonomi adalah Jepang²⁹. Jepang merupakan pasar ekspor beberapa komoditas utama Bali antara lain komoditas perikanan, travel goods, serta produk olahan kayu.

1.12 Indeks Pembangunan Manusia



Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup

manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations*



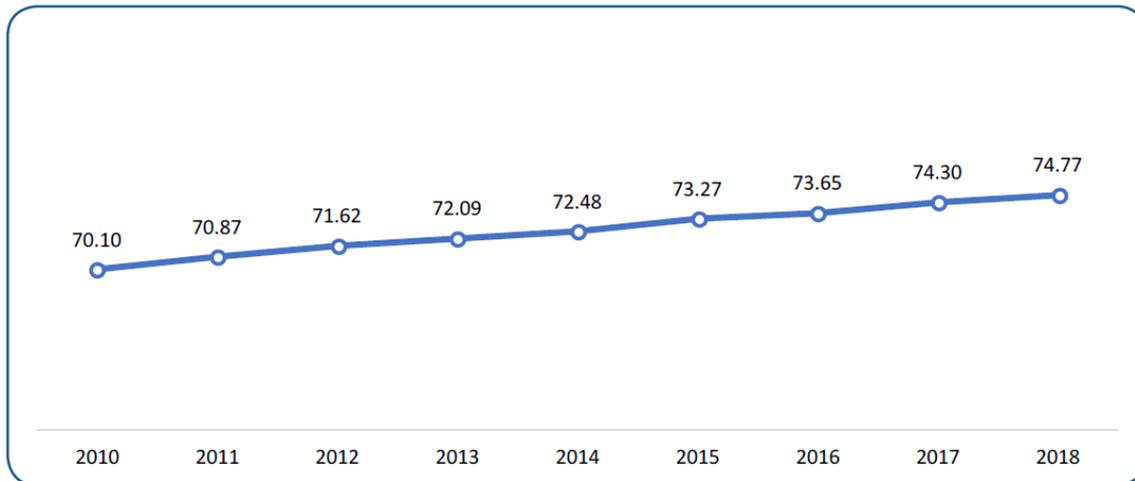
Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*).

Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Bali terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2018. IPM Bali meningkat dari 70,10 pada tahun 2010 menjadi 74,77 pada tahun 2018. Selama periode tersebut, IPM Bali rata-rata tumbuh sebesar 0,81 persen per tahun dan selalu berada di level “tinggi”. Pada periode 2017-2018, IPM Bali tumbuh 0,63 persen. Selain itu, IPM Bali tercatat sebagai peringkat lima tertinggi pada level nasional, di bawah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau.

Grafik 3.19

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali 2010-2018



Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2019 (data diolah B.Organisasi)

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.13

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Komponen, 2010-2018

Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	70,61	70,78	70,94	71,11	71,20	71,35	71,41	71,46	71,68
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,71	12,12	12,26	12,4	12,64	12,97	13,04	13,21	13,23
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,74	7,77	8,05	8,10	8,11	8,26	8,36	8,55	8,65
Pengeluaran per Kapita	Rp 000	12.074	12.307	12.530	12.738	12.831	13.078	13.279	13.573	13.886
IPM		70,10	70,87	71,62	72,09	72,48	73,27	73,65	74,30	74,77
Pertumbuhan IPM	%	-	1,10	1,06	0,66	0,54	1,09	0,52	0,88	0,63

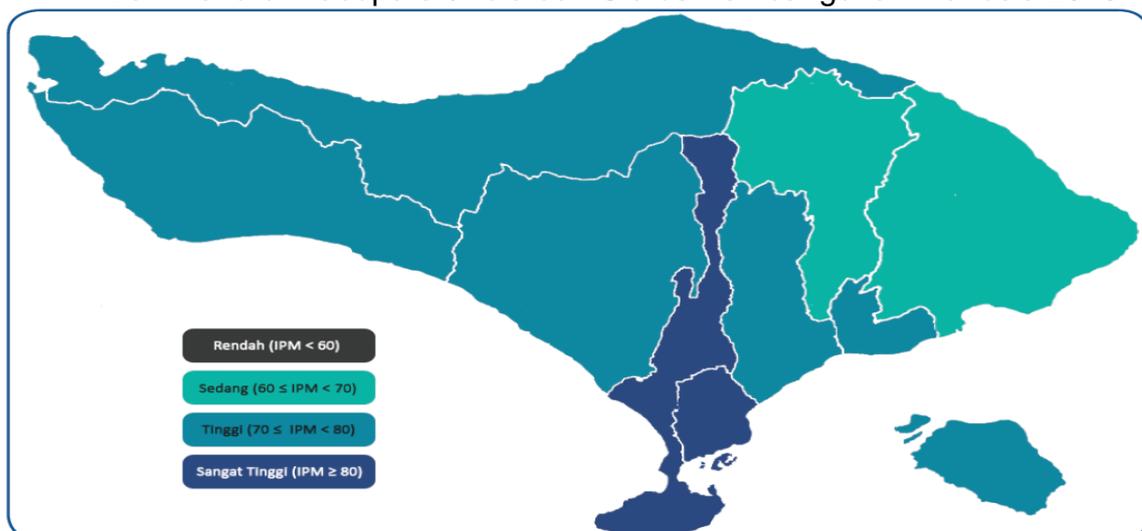
Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2019 (data diolah B.Organisasi)

Pada tahun 2018, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 66,49 (Karangasem) hingga 83,30 (Denpasar). Pada dimensi umur panjang dan

hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 70,05 tahun (Bangli & Karangasem) hingga 74,71 tahun (Badung). Sementara itu pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 12,31 tahun (Bangli) hingga 13,98 tahun (Denpasar), serta Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara 5,97 tahun (Karangasem) hingga 11,16 tahun (Denpasar). Pengeluaran per kapita di tingkat kabupaten/kota berkisar antara 10,05 juta rupiah per tahun (Karangasem) hingga 19,70 juta rupiah per tahun (Denpasar). Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2018 juga terlihat dari status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Secara umum, status pembangunan manusia Provinsi Bali tergolong “tinggi”. Hal tersebut tercermin dari sebagian besar kabupaten/kota memiliki nilai IPM antara 70 sampai 80. Terdapat 5 dari 9 kabupaten/kota yang berstatus pembangunan manusia “tinggi”, antara lain Klungkung, Jembrana, Buleleng, Tabanan dan Gianyar. Hanya dua kabupaten/kota yang berstatus “sedang”, yakni Bangli dan Karangasem. Hingga saat ini, terdapat 2 kabupaten/kota yang berstatus pembangunan manusia “sangat tinggi”, yaitu Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Kota Denpasar sendiri sudah tercatat berstatus “sangat tinggi” sejak tahun 2012 sampai sekarang. Sedangkan Kabupaten Badung baru terhitung dua tahun berstatus pembangunan manusia “sangat tinggi”.

Gambar 3.6

IPM Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia 2018





2. Capaian Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Perjanjian Kinerja

Realisasi pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari 22 (dua puluh dua) aspek yang menjadi prioritas pembangunan daerah Bali menuju Target RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019 dapat disajikan dalam table terlampir, dan pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.14 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja;

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2019	Realisasi 2019
1	2	3	4	5
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas layak	Tingkat Inflasi Bali	3.5	2.37
		Persentase Ketersediaan pangan utama	100	n/a
2	Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	16	n/a
3	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	27	n/a
4	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	Nilai Tukar Petani (NTP)	104.1	104.93
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	116.6	103.33
5	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	Umur Harapan Hidup	71.8	71.68
6	Terwujudnya wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	10	9.89
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	82.54	82.54
7	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Angka harapan lama sekolah	13.49	13.49
8	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya	Indeks Pembangunan Manusia	75.07	74.77



	saing tinggi			
9	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali	65	n/a



1	2	3	4	5
10	Terwujudnya kesejahteraan sosial krama bali	Persentase Kemiskinan	3.85	3.61
11	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompoten dan berdaya saing	Tingkat pengangguran terbuka	1.28	1.52
12	Meningkatnya kompetensi tenaga	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75.77	73.87
13	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Indeks Kebahagiaan	72.48	72.48
14	Meningkatnya pasar Pariwisata Bali	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	45	45
15	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	Jumlah Devisa sektor pariwisata	0	19,458,000
16	Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	Indeks Kepuasan wisatawan	77	79
17	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	6.25	5.34
18	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya bali	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	11	n/a
19	Meningkatnya kuantitas dan kualitas indfrastruktur dasar, laut dan udara secara terintegrasi an terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Indeks konektivitas	2.7	2.5
20	Meningkatnya rasa aman Krama Bali dan Wisata melakukan aktivitas kehidupannya	Angka Kriminalitas	4.138	4.037
21	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Indeks demokrasi	79	82.37
		Indeks Pemberdayaan gender	64.23	64.18



1	2	3	4	5
22	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	Persentase Daya dukung lingkungan	17.11	n/a
23	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62.08	62.62
		Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	9.7	8.57
		Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	0.43	0
24	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	68	n/a

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2019 (data diolah)

Tabel 3.15 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2018

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2018	2019		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat Inflasi Bali	3,4	3.5	2.37	147.68
2	Ketersediaan pangan utama	100	100	n/a	0
3	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	15	16	n/a	0
4	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	25	27	n/a	0
5	Nilai Tukar Petani (NTP)	103,87	104.1	104.93	100.79
6	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	116	116.6	103.33	88.62
7	Umur Harapan Hidup	71,4	71.8	71.68	99.83
8	Rata-rata lama sekolah	9,72	10	9.89	98.9



1	2	3	4	5	6
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	82,35	82.54	82.54	100
10	Angka harapan lama sekolah	13,21	13.49	13.49	100
11	Indeks Pembangunan Manusia	74,45	75.07	74.77	99.60
12	Indeks Daya Saing SDM Bali	65	65		0
13	Persentase Kemiskinan	3,91	3.85	3.61	106.64
14	Tingkat pengangguran terbuka	1,4	1.28	1.52	84.21
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,51	75.77	73.87	97.49
16	Indeks Kebahagiaan	72,48	72.48	72.48	100
17	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	45	45	45	100
18	Jumlah Devisa sektor pariwisata	6.000.000	0	19,458,000	N/A
19	Indeks Kepuasan wisatawan	75	77	79	102.59
20	Pertumbuhan Ekonomi	6,35	6.25	5.34	85.44
21	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	10	11	n/a	0
22	Indeks konektivitas	2,74	2.7	2.5	92.59
23	Angka Kriminalitas	4.607	4.138	4.037	97.56
24	Indeks demokrasi	78,8	79	82.37	104.26
25	Indeks Pemberdayaan gender	63,76	64.23	64.18	99.92
26	Persentase Daya dukung lingkungan	16,93	17.11	n/a	0
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,51	62.08	62.62	100.86



1	2	3	4	5	6
28	Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	8,7	9.7	8.57	88.35
29	Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	0,40	0.43	0	0
30	Indeks Reformasi Birokrasi	66,16	68	n/a	0

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2019 (data diolah)

Tabel 3.16 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2018	2019			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2019 trhdhp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Inflasi Bali	3,4	3.5	2.37	147.68	3.00	102,59
2	Ketersediaan pangan utama	100	100	n/a	0	100.00	0
3	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	15	16	n/a	0	25.00	0
4	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	25	27	n/a	0	35.00	0
5	Nilai Tukar Petani (NTP)	103,87	104.1	104.93	100.79	106.00	98.99
6	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	116	116.6	103.33	88.62	119.20	86.68
7	Umur Harapan Hidup	71,4	71.8	71.68	99.83	72.50	98.86
8	Rata-rata lama sekolah	9,72	10	9.89	98.9	11.40	86.75
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	82,35	82.54	82.54	100	83.30	99.087
10	Angka harapan lama sekolah	13,21	13.49	13.49	100	14.05	96.02



1	2	3	4	5	6	7	8
11	Indeks Pembangunan Manusia	74,45	75.07	74.77	99.60	80.00	93.46
12	Indeks Daya Saing SDM Bali	65	65	n/a	0	75.00	0
13	Persentase Kemiskinan	3,91	3.85	3.61	106.64	1.50	41.55
14	Tingkat pengangguran terbuka	1,4	1.28	1.52	84.21	0.90	59.21
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,51	75.77	73.87	97.49	76.80	96.18
16	Indeks Kebahagiaan	72,48	72.48	72.48	100	74.98	96.66
17	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	45	45	45	100	45.00	100
18	Jumlah Devisa sektor pariwisata	6.000.000	0	19,458,000	N/A	12.015.000	N/A
19	Indeks Kepuasan wisatawan	75	77	79	102.59	85.00	92.94
20	Pertumbuhan Ekonomi	6,35	6.25	5.34	85.44	7.00	76.28
21	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	10	11	n/a	0	13.00	0
22	Indeks konektivitas	2,74	2.7	2.5	92.59	2.30	108.69
23	Angka Kriminalitas	4.607	4.138	4.037	97.56	2.26	56.03
24	Indeks demokrasi	78,8	79	82.37	104.26	81.00	101.69



1	2	3	4	5	6	7	8
25	Indeks Pemberdayaan gender	63,76	64.23	64.18	99.92	65.00	98.73
26	Persentase Daya dukung lingkungan	16,93	17.11	n/a	0	17.82	0
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,51	62.08	62.62	100.86	64.34	97.32
28	Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	8,7	9.7	8.57	88.35	15.00	57.13
29	Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	0,40	0.43	0	0	20.00	0
30	Indeks Reformasi Birokrasi	66,16	68	n/a	0	76.00	0

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2019 (data diolah)

2.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang telah Dicapai.

2.4.1 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (Farmers Term of Trade) merupakan salah satu indikator proksi untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa yang diperlukan petani untuk biaya produksi usaha pertaniannya maupun untuk konsumsi rumah tangganya. Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Semakin tinggi indeks NTP, secara relatif mencerminkan semakin kuat pula peranannya pada ukuran tingkat kemampuan/daya beli petani.

Mengakhiri tahun 2019, Indeks NTP Provinsi Bali pada bulan Desember 2019 tercatat meningkat setinggi 0,55 persen, dari 104,35 pada bulan November



2019 menjadi 104,93. Kenaikan ini dipengaruhi oleh naiknya indeks harga yang diterima petani (It) lebih tinggi daripada kenaikan indeks yang dibayar petani (Ib). Indeks harga yang diterima petani (It) tercatat 139,65 atau naik setinggi 1,08 persen dibandingkan bulan November 2019 yang tercatat besarnya 138,16. Sementara itu, indeks yang dibayar petani (Ib) tercatat meningkat setinggi 0,52 persen dari 132,40 di bulan November 2019 menjadi 133,09.

Pada bulan Desember 2019, indeks yang diterima petani tanaman pangan tercatat naik setinggi 0,39 persen, sedangkan indeks yang dibayar petani tercatat naik lebih tinggi, yaitu 0,64 persen. Hal ini menyebabkan indeks NTP subsektor tanaman pangan di bulan Desember 2019 menurun sedalam - 0,25 persen. Kenaikan yang tercatat pada It dipengaruhi naiknya indeks kelompok padi dan kelompok palawija masing-masing setinggi 0,18 persen dan 0,91 persen. Komoditas yang dominan mengalami kenaikan harga, antara lain ketela pohon, gabah, dan ubi jalar. Sementara itu, kenaikan pada Ib, dipengaruhi oleh naiknya indeks konsumsi rumahtangga setinggi 0,77 persen dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) mencapai 0,04 persen.

Indeks NTP Subsektor Hortikultura (NTP-H) pada bulan Desember 2019 tercatat meningkat setinggi 0,54 persen, dari 105,04 pada bulan November 2019 menjadi 105,60. Kenaikan ini disebabkan oleh It yang tercatat naik setinggi 1,10 persen, lebih tinggi dibandingkan Ib yang tercatat naik setinggi 0,56 persen. Kenaikan yang tercatat pada It merupakan sumbangan dari naiknya indeks harga pada semua kelompok, yaitu kelompok sayur-sayuran naik setinggi 2,08 persen, disusul kelompok tanaman obat naik setinggi 1,75 persen, dan kelompok buah-buahan naik setinggi 0,62 persen. Beberapa komoditas yang tercatat menyumbang kenaikan pada It antara lain salak, tomat, pisang, dan bawang merah. Sementara itu, kenaikan pada Ib disebabkan oleh naiknya indeks konsumsi rumah tangga setinggi 0,74 persen dan indeks BPPBM yang juga naik setinggi 0,05 persen.

Pada penghujung tahun 2019, tanaman perkebunan rakyat tercatat sebagai subsektor dengan kenaikan indeks NTP paling tinggi, yaitu sebesar 2,36



persen, dari 92,43 pada bulan November 2019 menjadi 94,61. Meskipun demikian, kondisi ini masih perlu mendapat perhatian karena nilainya kurang dari 100 yang memberi gambaran bahwa usaha pertanian perkebunan rakyat belum cukup menjanjikan dalam menunjang ekonomi rumah tangga pelakunya. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan It yang tercatat naik setinggi 2,91 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan Ib yang tercatat naik setinggi 0,54 persen. Kenaikan pada It dipicu oleh naiknya rata-rata harga komoditas hasil perkebunan rakyat, yaitu kopi, kelapa dan kakao. Di sisi lain, kenaikan Ib disebabkan oleh naiknya indeks Konsumsi Rumah Tangga dan indeks BPPBM masing-masing setinggi 0,69 persen dan 0,04 persen.

Indeks NTP Subsektor Peternakan (NTP-Pt) pada bulan Desember 2019 juga tercatat meningkat, dari 114,43 menjadi 114,54. Kenaikan ini disebabkan oleh It yang tercatat naik setinggi 0,48 persen, sedangkan Ib tercatat naik lebih rendah yaitu 0,38 persen. Kenaikan yang tercatat pada It disumbang oleh naiknya kelompok ternak besar dan kelompok hasil ternak, yang masing-masing naik setinggi 0,89 persen dan 1,33 persen. Sebaliknya kelompok ternak kecil dan kelompok unggas tercatat mengalami penurunan, masing-masing turun sedalam -0,53 persen dan - 1,10 persen. Adapun beberapa komoditas yang tercatat mengalami kenaikan, yaitu sapi potong, telur ayam dan telur itik. Sementara itu, kenaikan yang tercatat pada Ib disumbang oleh naiknya indeks KRT setinggi 0,69 persen, dan kenaikan indeks BPPBM yang naik setinggi 0,06 persen.

Subsektor perikanan mencakup kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perikanan. Subsektor Perikanan (NTP-Pi) pada bulan Desember 2019 indeks NTP kembali tercatat menurun setelah bulan sebelumnya juga tercatat menurun. Penurunan pada indeks NTP-Pi tercatat sedalam -0,50 persen, dari 103,84 pada bulan November 2019 menjadi 103,33. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan indeks harga yang diterima petani sedalam -0,08 persen sebaliknya indeks yang dibayar petani (Ib) tercatat meningkat setinggi 0,41 persen. Jika dilihat lebih rinci, penurunan It sendiri dipengaruhi oleh penurunan pada indeks perikanan tangkap, yaitu sedalam -0,61 persen, meskipun pada kelompok budidaya



perikanan tercatat meningkat setinggi 0,93 persen. Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga, antara lain ikan lemuru, cumi-cumi, dan kerapu. Sementara itu, adanya kenaikan pada Ib dipengaruhi oleh naiknya indeks konsumsi rumah tangga dan indeks BPPBM masing-masing setinggi 0,49 persen dan 0,22 persen.



Tabel 3.17
Indeks Nilai Tukar Petani Provinsi Bali dan Perubahannya Menurut Subsektor
November 2019-Desember 2019

Subsektor	Bulan		Persentase Perubahan
	November 2019	Desember 2019	
1. Tanaman Pangan (NTP-P)	101,78	101,52	-0,25
a. Indeks Diterima Petani	139,11	139,65	0,39
- Padi	133,70	133,94	0,18
- Palawija	154,91	156,33	0,91
b. Indeks Dibayar Petani	136,68	137,56	0,64
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	137,88	138,93	0,77
- Indeks BPPBM	131,13	131,19	0,04
2. Hortikultura (NTP-H)	105,04	105,60	0,54
a. Indeks Diterima Petani	140,38	141,93	1,10
- Sayur-sayuran	151,04	154,18	2,08
- Buah-buahan	135,63	136,46	0,62
- Tanaman Obat	141,34	143,82	1,75
b. Indeks Dibayar Petani	133,65	134,40	0,56
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	136,50	137,50	0,74
- Indeks BPPBM	125,92	125,98	0,05
3. Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-Pr)	92,43	94,61	2,36
a. Indeks Diterima Petani	123,06	126,64	2,91
- Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR)	123,06	126,64	2,91
b. Indeks Dibayar Petani	133,13	133,85	0,54
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	138,11	139,06	0,69
- Indeks BPPBM	118,17	118,22	0,04
4. Peternakan (NTP-Pt)	114,43	114,54	0,10
a. Indeks Diterima Petani	146,34	147,04	0,48
- Ternak Besar	150,85	152,19	0,89
- Ternak Kecil	146,62	145,84	-0,53
- Unggas	139,84	138,30	-1,10
- Hasil Ternak	126,94	128,62	1,33
b. Indeks Dibayar Petani	127,89	128,37	0,38
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	137,59	138,55	0,69
- Indeks BPPBM	119,38	119,46	0,06
5. Perikanan (NTP-Pi)	103,84	103,33	-0,50
a. Indeks Diterima Petani	139,45	139,33	-0,08
- Tangkap	153,51	152,58	-0,61
- Budidaya	118,60	119,70	0,93
b. Indeks Dibayar Petani	134,29	134,85	0,41
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	143,50	144,20	0,49
- Indeks BPPBM	116,52	116,77	0,22
NTP Gabungan	104,35	104,93	0,55
a. Indeks Diterima Petani	138,16	139,65	1,08
b. Indeks Dibayar Petani	132,40	133,09	0,52
- Indeks Konsumsi Rumah tangga	137,60	138,58	0,71
- Indeks BPPBM	123,17	123,23	0,05



Pada bulan Desember 2019, Indeks NTP gabungan secara nasional tercatat 104,46 naik setinggi 0,35 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima petani (It) nasional yang naik setinggi 0,59 persen, sebaliknya indeks harga yang dibayar petani (Ib) tercatat meningkat lebih rendah, yaitu 0,24 persen.

Tabel 3.18

Indeks Nilai Tukar Petani Bali dan Nasional serta Persentase Perubahannya, November 2019 – Desember 2019

Indeks	Provinsi Bali			Nasional		
	November 2019	Desember 2019	%	November 2019	Desember 2019	%
Indeks yang Diterima Petani	138,16	139,65	1,08	142,72	143,56	0,59
Indeks yang Dibayar Petani	132,40	133,09	0,52	137,10	137,42	0,24
NTP	104,35	104,93	0,55	104,10	104,46	0,35

Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2019 (data diolah B.Organisasi)

Indeks Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib) dengan komponen Ib yang hanya terdiri dari Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Dengan dikeluarkannya komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (KRT) dari penghitungan Ib, Indeks NTUP dimaksudkan dapat lebih mencerminkan margin usaha pertanian, karena yang dibandingkan hanya harga hasil produksi dengan biaya produksinya.

Tabel 3.19

Indeks Nilai Tukar Usaha Pertanian per Subsektor dan Persentase Perubahan November 2019 – Desember 2019

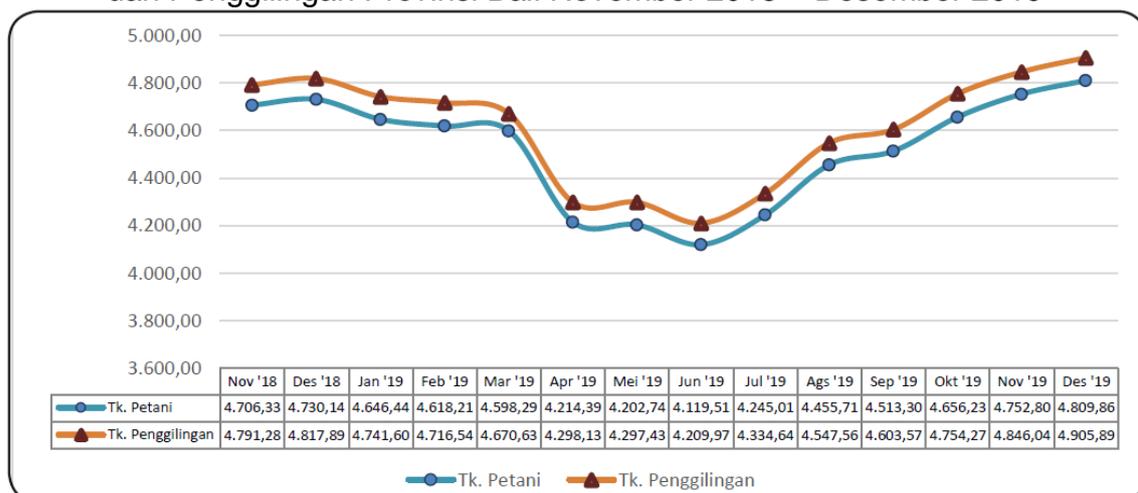
Subsektor	Bulan		Persentase Perubahan
	November 2019	Desember 2019	
1. Tanaman Pangan	106,08	106,45	0,35
2. Hortikultura	111,48	112,66	1,06
3. Tanaman Perkebunan Rakyat	104,13	107,12	2,87
4. Peternakan	122,59	123,09	0,41
5. Perikanan	119,68	119,32	-0,30
a. Perikanan Tangkap	129,81	128,89	-0,71
b. Perikanan Budidaya	104,08	104,63	0,53
NTUP Bali	112,18	113,33	1,02

Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2019 (data diolah B.Organisasi)

Indeks NTUP Desember 2019, tercatat naik setinggi 1,02 persen, dari 112,18 pada bulan sebelumnya menjadi 113,33. Kenaikan indeks NTUP tercatat pada hampir semua subsektor, kecuali subsektor perikanan. Indeks NTUP yang tercatat meningkat tertinggi, yaitu subsektor tanaman perkebunan rakyat dengan kenaikan setinggi 2,87 persen, disusul oleh subsektor hortikultura yang naik setinggi 1,06 persen, subsektor peternakan 0,41 persen, dan subsektor tanaman pangan 0,35 persen. Sebaliknya indeks NTUP subsektor perikanan tercatat menurun sedalam -0,30 persen. Jika dilihat indeks NTUP subsektor perikanan lebih rinci, terlihat bahwa indeks NTUP perikanan tangkap (nelayan) tercatat menurun sedalam -0,71 persen, meskipun kelompok perikanan budidaya tercatat meningkat setinggi 0,53 persen.

Berdasarkan hasil pencatatan harga gabah di 7 (tujuh) kabupaten amatan, yaitu Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Karangasem dan Buleleng selama bulan Desember 2019, harga rata-rata gabah kering panen (GKP) di tingkat petani naik setinggi 1,20 persen, dari Rp 4.752,80 per kilogram pada bulan sebelumnya menjadi Rp 4.809,86 per kilogram. Demikian pula, rata-rata harga GKP di tingkat penggilingan tercatat meningkat setinggi 1,23 persen dari Rp.4.846,04 per kilogram menjadi Rp 4.905,89 per kilogram.

Grafik 3.20
Perkembangan Rata-rata Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Petani dan Penggilingan Provinsi Bali November 2018 – Desember 2019

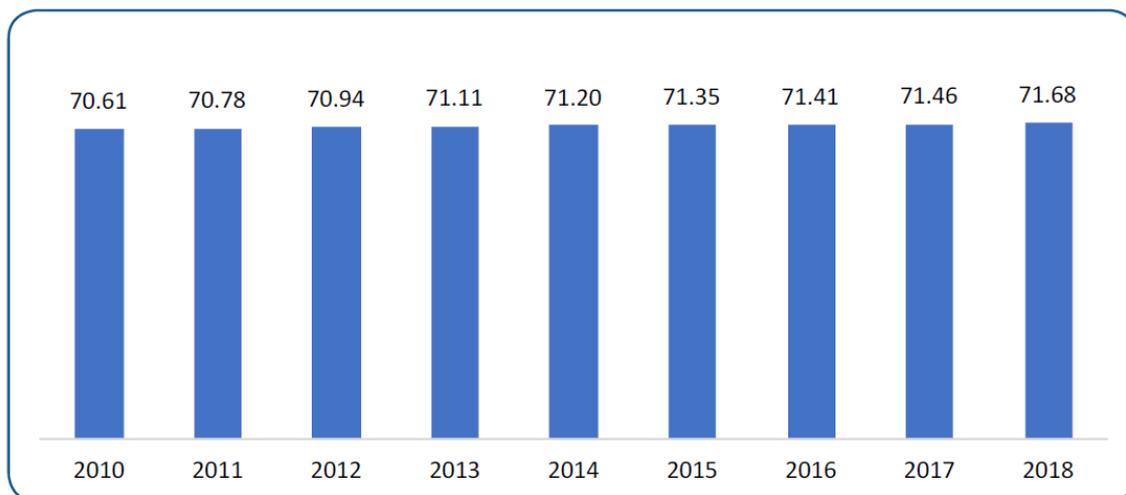


Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2019 (diolah B. Organisasi)

2.4.2 Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2018, Bali tercatat mampu meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 1,07 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,19 persen per tahun. Pada tahun 2010, Umur Harapan Hidup saat lahir di Bali tercatat baru mencapai 70,61 tahun, dan pada tahun 2018 telah mencapai 71,68 tahun.

Grafik 3.21
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Bali, 2010 - 2018



Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2019 (data diolah B.Organisasi)

Selama lima tahun terakhir, UHH Provinsi Bali mengalami peningkatan seperti grafik di atas. Hal ini merupakan hasil capaian dari UHH Kabuapten/Kota yang juga mengalami peningkatan seperti tabel di bawah ini.

Kab/kota	Capaian		Pertumbuhan
	2017	2018	2017-2018
Badung	74,53	74,71	0,18
Bangli	69,83	70,05	0,22
Buleleng	71,14	71,36	0,22
Denpasar	74,17	74,38	0,21
Gianyar	73,06	73,26	0,2



Jembrana	71,70	71,91	0,21
Karangasem	69,85	70,05	0,2
Klungkung	70,45	70,70	0,25
Tabanan	73,03	73,23	0,2
BALI	71,46	71,68	0,22

Tahun 2018, Kabupaten Badung tercatat mencapai UHH tertinggi di Provinsi Bali yaitu 74,71, sedangkan yang terendah adalah Kabuapten Bangli dan Kabuapten Karangasem yaitu 70,05.

Selama periode 20017 hingga 2018, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan pencapaian Umur Harapan Hidup. Pada periode ini, kabuapten Badung tercatat mengalami peningkatan UHH paling lambat (0,18) meski sebagai kabuapten/kota dengan UHH tertinggi di provinsi Bali. Sedangkan yang tercatat mengalami peningkatan UHH paling tinggi pada periode ini adalah Kabupaten Klungkung yaitu sebesar 0,25.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang dicapai:

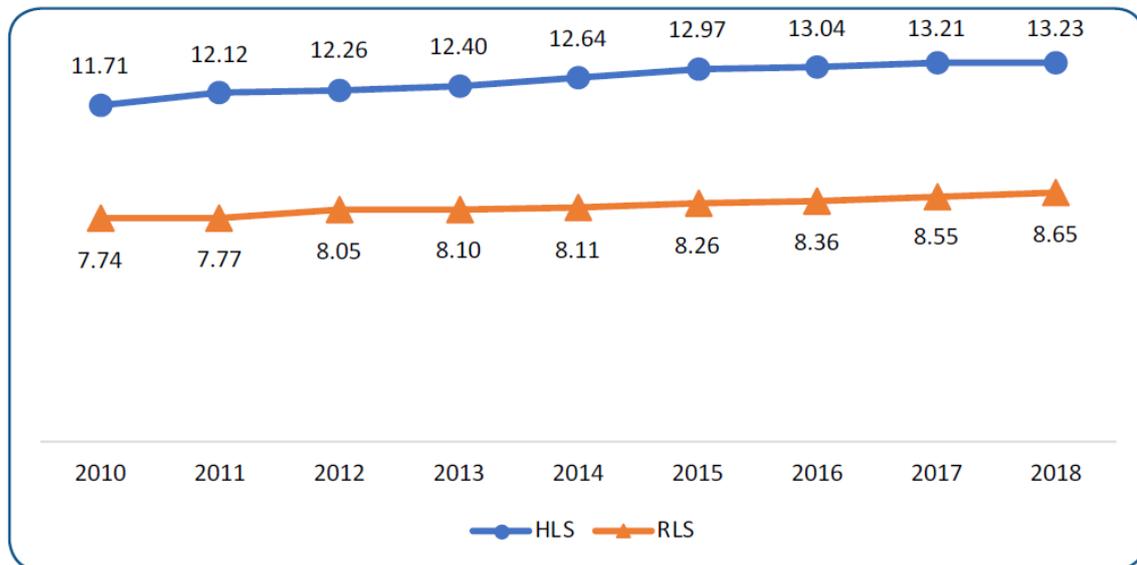
UHH merupakan indikator komposit dari indikator kesehatan, indikator pendidikan dan indikator ekonomi. Untuk indikator kesehatan, yang berperan adalah akses pelayanan kesehatan yang meliputi tercukupinya sarana, parasarana dan alat kesehatan, sumber daya manusia kesehatan yang kompeten, upaya kesehatan yang optimal baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat serta sanitasi dan kesehtaan lingkungan. Peningkatan UHH Provinsi Bali dari tahun ke tahun tidak terlepas dari adanya pemanfaatan sarana kesehatan yang optimal, ketersediaan dan sebaran tenaga kesehatan diseluruh Provinsi Bali yang makin meningkat dan adanya Jaminan Kesehatan Nasional *Krama* Bali Sejahtera untuk pembiayaan kesehatan.

2.4.3 Rata – Rata Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2018, Harapan Lama Sekolah di Bali tercatat meningkat sebesar 1,52 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah tercatat meningkat 0,91 tahun.

Grafik 3.22

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah Bali, 2010 - 2018



Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2019 (data diolah B.Organisasi)

Selama periode 2010 hingga 2018, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tercatat tumbuh sebesar 1,54 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2018, Harapan Lama Sekolah di Bali tercatat telah mencapai 13,23 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1 atau Universitas tingkat dua.

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Bali tercatat tumbuh 1,40 persen per tahun selama periode 2010 hingga 2018. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Bali yang lebih baik. Pada tahun 2018, secara rata-rata



penduduk Bali usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan formal selama 8,65 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II).

Berdasarkan data publikasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana tentang Agregat Kependudukan Provinsi Bali Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 Tahun 2019 ternyata Jumlah penduduk Provinsi Bali telah mencapai 4.236.983 jiwa dengan perbandingan laki-perempuan (sex-ratio) 101 artinya ada 100 penduduk perempuan dalam 101 laki-laki.

Menyangkut urusan layanan Dinas Pendidikan Provinsi Bali maka komponen vital data kependudukan yang menjadi sasaran adalah agregat data terkait dengan jumlah penduduk kelompok usia balita, usia sekolah, usia produktif dan usia tua. Empat variabel utama keadaan kependudukan yakni usia balita, usia sekolah, usia produktif dan usia tua dibutuhkan untuk selanjutnya dipakai acuan dalam pelaksanaan program-program : Pembinaan SMA; Pembinaan SMK; dan Pembinaan Pendidikan Khusus. Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni terkait dengan kewenangan urusan Provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus (SLB).

Berdasarkan data keadaan penduduk menurut kelompok usia balita, usia sekolah, usia produktif dan usia tua lihat sebagai berikut

Tabel 3.20
Keadaan penduduk menurut kelompok umur balita, usia sekolah, usia produktif dan usia tua tahun 2019

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
00-04	131.918	3,11	122.075	2,88	253.993	5,99
05-06	65.996	1,56	62.233	1,47	128.229	3,03
07-12	213.922	5,05	199.541	4,71	413.463	9,76
13-15	105.527	2,49	99.403	2,35	204.930	4,84
16-18	109.250	2,58	102.626	2,42	211.876	5,00



19-25	239.400	5,65	226.046	5,34	465.446	10,99
26-64	1.095.050	25,85	1.110.376	26,21	2.205.426	52,05
65+	166.963	3,94	186.657	4,41	353.620	8,35
TOTAL PROVINSI	2.128.026	50,23	2.108.957	49,77	4.236.983	100

Sumber : Dukcapil dan KB Pemerintah Provinsi Bali, Semester I 2019.

Keadaan penduduk menurut kelompok umur balita, usia sekolah, usia produktif dan usia tua tahun 2019 memperlihatkan bahwa total penduduk usia sekolah dengan rentangan umur antara 7 -18 tahun mencapai 830.269 jiwa atau 19,60% yang harus mendapat layanan minimal pendidikan. Sementara capaian prestasi Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang terukur berdasarkan indikator angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Menengah (SMA/SMK) di tahun 2019 telah mencapai 98,00% artinya masih ada 2% penduduk usia sekolah yang belum menempuh pendidikan SMA/SMK. Jika dilihat dari keadaan penduduk usia 16-18 tahun yang berjumlah 211.876 jiwa atau sebesar 5% dari total jumlah penduduk.

Jika disandingkan dengan capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Bali di tahun 2019 terhadap angka partisipasi murni (APM) penduduk usia 16-18 tahun yang mencapai 73,21% maka ada penduduk kelompok umur 16-18 tahun sebesar 26,79% yang belum menempuh pendidikan SMA/SMK. Jika, antara APK dan APM disandingkan maka APK (98,00%) yang lebih besar dari APM (73,21%) yakni sebesar 24,79%, artinya ada tambahan partisipasi penduduk usia sekolah lagi sebesar 24,79% baik yang berasal dari kelompok umur sama atau dibawah 16 tahun maupun dari kelompok umur sama atau lebih besar dari 18 tahun.

Kemudian yang menjadi indikator kinerja utama dalam RPJMD Semesta Berencana Pemerintah Provinsi Bali 2018-2023 adalah rata-rata lama sekolah. Searah dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang tertuang dalam Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Pendidikan Provinsi Bali 2018-2023 maka fokus rata-



rata lama sekolah merupakan indikator tujuan yaitu : “Terwujudnya Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkwalitas”.

Berdasarkan hasil perhitungan data Agregat Kependudukan Provinsi Bali Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 Tahun 2019 diperoleh angka meyakinkan bahwa rata-rata lama sekolah di tahun 2019 mencapai 9,89 tahun telah melampaui data awal tahun 2018 sebesar 9,72 tahun artinya telah meningkat sebesar 0,17 tahun. Namun, masih dibawah target 10 tahun. Harapannya meningkat sebesar 0,28 tahun kenyataannya hanya 0,17 tahun. Keadaan ini, terjadi karena APM penduduk usia 16-18 belum 100% yang berkontribusi besar untuk perhitungan agregat rata-rata lama sekolah.

Tabel 3.21

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditamatkan

PENDIDIKAN AKHIR	LK	PR	JUMLAH	%
TIDAK/BELUM SEKOLAH	481.515	497.517	979.032	23,11
BELUM TAMAT SD	197.233	198.671	395.904	9,34
TAMAT SD	441.885	553.327	995.212	23,49
TAMAT SLTP	248.704	246.653	495.357	11,69
TAMAT SLTA	562.142	450.255	1.012.397	23,89
D1/D2	38.463	24.098	62.561	1,48
D3/SARJANA MUDA	29.799	32.460	62.259	1,47
S1/DIV	116.630	99.184	215.814	5,09
S2	10.619	6.385	17.004	0,40
S3	1.036	407	1.443	0,03
TOTAL PROVINSI	2.128.026	2.108.957	4.236.983	100,00

2.4.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun



demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

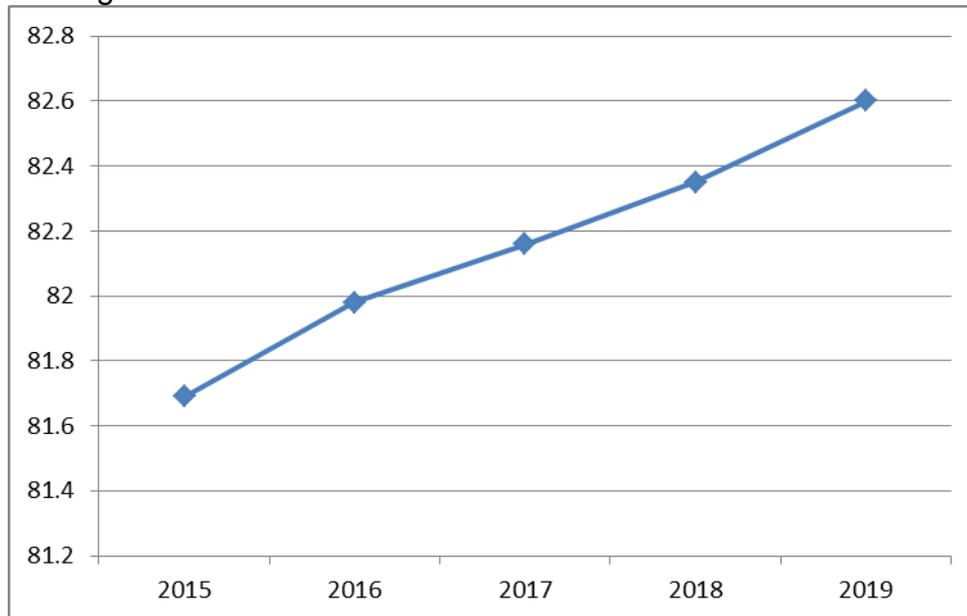
Rumus APS:

- $APS(7-12) = \left\{ \frac{\text{Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun yang masih sekolah}}{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 tahun}} \times 100 \right\}$
- $APS(13-15) = \left\{ \frac{\text{Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun yang masih sekolah}}{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 tahun}} \times 100 \right\}$
- $APS(16-18) = \left\{ \frac{\text{Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun yang masih sekolah}}{\text{Jumlah penduduk umur 16-18 tahun}} \times 100 \right\}$

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Provinsi memiliki tanggungjawab besar terkait urusan pelayanan pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus (SLB). Dearah pula dengan Tujuan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 bahwa untuk urusan layanan bidang pendidikan diarahkan untuk tercapainya : “Terwujudnya Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkwalitas”. Capaian pendekatannya dilakukan dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yakni : 1) Rata-rata lama sekolah; dan 2) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun.

Berdasarkan data BPS Provinsi Bali secara berturut-turut dalam rentang waktu 5 tahun terhitung : 2015; 2016; 2017; 2018; dan 2019 capaian APS penduduk usia 16-18 tahun Provinsi Bali adalah 81,69%; 81,98%; 82,16%; 82,35%; dan 82,60%.

Grafik 3.23
Perkembangan APS Penduduk Usia 16 -18 Tahun Provinsi Bali 2015 s.d 2019



Sumber : Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga Provinsi Bali, Tahun 2019

Secara nasional APS Penduduk Usia 16-18 tahun Provinsi Bali untuk tahun 2018 menduduki peringkat 5 (lima) dibawah Jogja 88,39%; Kepulauan Riau 83,78%; Sumatera Barat 83,08%; Aceh 82,92%; dan Bali 82,35%.

Grafik 3.24
Perbandingan Pertumbuhan APS Penduduk Usia 16 – 18 tahun Provinsi Bali dan Rata-rata APS Nasional

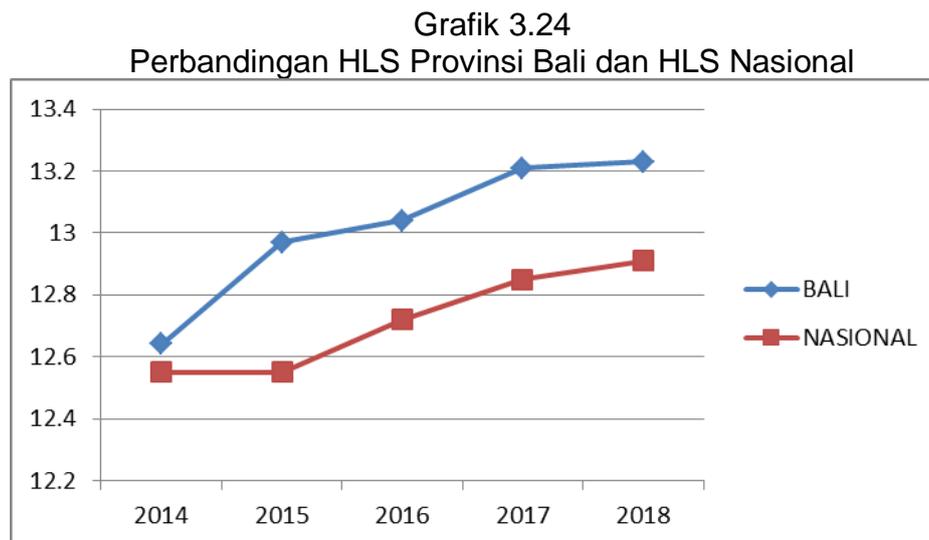


Sumber : Disdikpora Provinsi Bali Tahun 2019.

2.4.5 Angka Harapan Lama Sekolah (sedang proses).

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS Indonesia 5 tahun terakhir terhitung 2014; 2015; 2016; 2017 dan 2018 berturut-turut 12,39 tahun; 12,55 tahun; 12,72 tahun; 12,85 tahun; dan 12,91 tahun.

Sementara perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Bali dalam rentang waktu lima tahun terakhir terhitung 2014; 2015; 2016; 2017 dan 2018 berturut-turut 12,64 tahun; 12,97 tahun; 13,04 tahun; 13,21 tahun; dan 13,23 tahun. Jika, dibandingkan posisi HLS Bali dengan rata-rata nasional Bali selalu berada di atas rata-rata nasional.

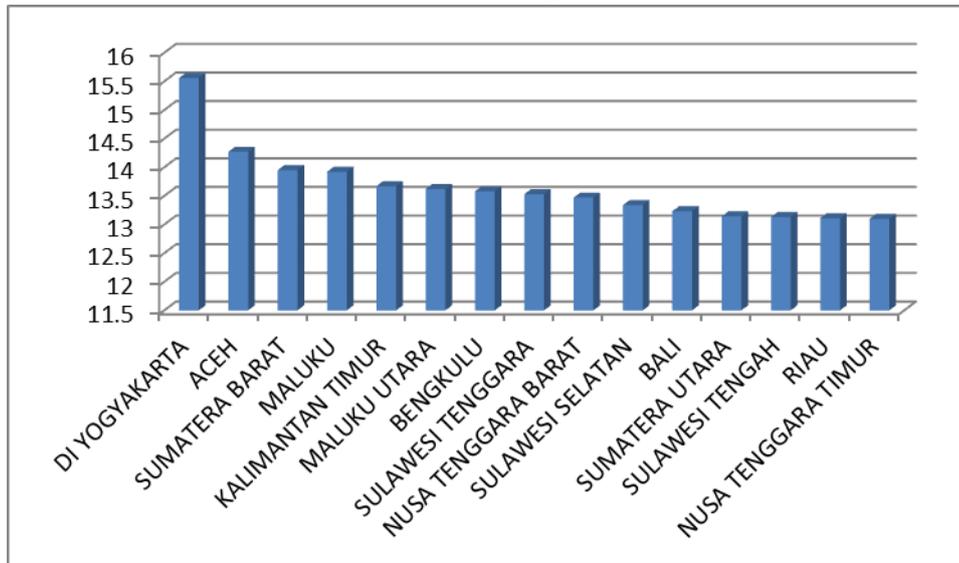


Sumber : Disdikpora, Tahun 2019

Provinsi Bali saat ini menduduki peringkat ke-11 Harapan Lama Sekolah di Indonesia. Posisi ini jauh di bawah DIY yang menduduki peringkat 1. Bahkan di kawasan Bali-Nusra, Bali berada di bawah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berada di peringkat 9. Harapan Lama Sekolah ini merupakan indikator dari penentuan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) nasional. “Harapan Lama Sekolah ini berkaitan dengan umur orang Bali yang sudah sekolah atau belum.

Ini dihitung dari usia 7 tahun, jadi berapa persen sebenarnya usia 7 tahun sudah sekolah, berapa persen yang 8 tahun, 9 tahun, ternyata masih rendah untuk di Bali.

Grafik 3.25
Posisi HLS Bali di tingkat nasional



Sumber : Disdikpora Provinsi Bali, Tahun 2019

2.4.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Gas Rumah Kaca dan EBT

Capaian kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Bali yang terdiri atas Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Tutupan Lahan sebagai berikut:



Tabel 3.22
Status Indeks Pencemaran Sungai di Bali Tahun 2019

NO	Nama Sungai	Tahun 2019		RATA - RATA INDEKS PENCEMARAN	
		Nilai IP	Status Mutu		
1	Tukad Saba 1	0,50	MEMENUHI BM	0,57	MEMENUHI BM
2	Tukad Saba 2	0,59	MEMENUHI BM		
3	Tukad Saba 3	0,54	MEMENUHI BM		
4	Tukad Sungi 1	0,49	MEMENUHI BM		
5	Tukad Sungi 2	0,59	MEMENUHI BM		
6	Tukad Sungi 3	0,73	MEMENUHI BM		
7	Tukad Badung 1	0,47	MEMENUHI BM	0,59	MEMENUHI BM
8	Tukad Badung 2	0,57	MEMENUHI BM		
9	Tukad Badung 3	0,74	MEMENUHI BM		
10	Tukad Unda 1	0,55	MEMENUHI BM	1,52	CEMAR RINGAN
11	Tukad Unda 2	1,55	CEMAR RINGAN		
12	Tukad Unda 3	1,90	CEMAR RINGAN		
13	Tukad Melangit 1	0,71	MEMENUHI BM		
14	Tukad Melangit 2	3,47	CEMAR RINGAN		
15	Tukad Melangit 3	0,92	MEMENUHI BM		
16	Tukad Pekerisan 1	1,47	CEMAR RINGAN	1,03	CEMAR RINGAN
17	Tukad Pekerisan 2	1,37	CEMAR RINGAN		
18	Tukad Pekerisan 3	0,25	MEMENUHI BM		
19	Tukad Sangsang 1	0,66	MEMENUHI BM	0,92	MEMENUHI BM
20	Tukad Sangsang 2	0,69	MEMENUHI BM		
21	Tukad Sangsang 3	1,41	CEMAR RINGAN		
22	Tukad Bilok Poh 1	0,61	MEMENUHI BM	0,67	MEMENUHI BM
23	Tukad Bilok Poh 2	0,70	MEMENUHI BM		
24	Tukad Bilok poh 3	0,69	MEMENUHI BM		

Sumber : Dinas Kehutan dan Lingkungan Hidup

Di lihat dari status indeks pencemaran sungai di Bali, seperti tabel di atas terdapat beberapa sungai telah memenuhi baku mutu antara lain Tukad Saba, Tukad Sungi, Tukad Badung, Tukad Sangsang, Tukad Bilok Poh. Sedangkan sungai yang masih tercemar ringan yaitu Tukad Unda, Tukad Melangit, Tukad Pakerisan.



Tabel 3.23
Nilai Indeks Pencemaran Danau di Bali Tahun 2019

Nama Sungai	Titik Pantau	Tahun 2019		RATA - RATA INDEKS PENCEMARAN	
		Nilai IP	Status Mutu		
DANAU BATUR				3,20	CEMAR RINGAN
Danau Batur 1	Dermaga Penyebrangan Desa Kedisan	3,18	CEMAR RINGAN		
Danau Batur 2	Depan Pura Ulun Tirta, Ulun Danu, Desa Songan	3,24	CEMAR RINGAN		
DANAU BERATAN				1,66	CEMAR RINGAN
Danau Beratan 1	Dermaga/Restoran Bedugul	1,61	CEMAR RINGAN		
Danau Beratan 2	Pura Ulun Danu Beratan	1,71	CEMAR RINGAN		
DANAU BUYAN				1,69	CEMAR RINGAN
Danau Buyan 1	Br. Yuhmas, Desa Pancasari (Kawasan pemukiman & perkebunan)	1,54	CEMAR RINGAN		
Danau Buyan 2	Pinggir Danau Buyan (Pura Ulun Danu Batu Meringgit)	1,84	CEMAR RINGAN		
DANAU TAMBLINGAN				2,20	CEMAR RINGAN
Danau Tamblingan 1	Pinggir Danau Tamblingan (Depan Pura Bubug/dermaga)	1,72	CEMAR RINGAN		
Danau Tamblingan 2	Pinggir Danau Tamblingan (Depan Pura Ulun Danu Tamblingan)	2,68	CEMAR RINGAN		

Sumber : Dinas Kehutanan dan LH Provinsi Bali, Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dari 4 (empat) danau di Provinsi Bali rata-rata status nilai Indeks Pencemaran Danau yaitu cemar ringan.

Tabel 3.24
Nilai Indeks Pencemaran Air Laut Tahun 2018-2019

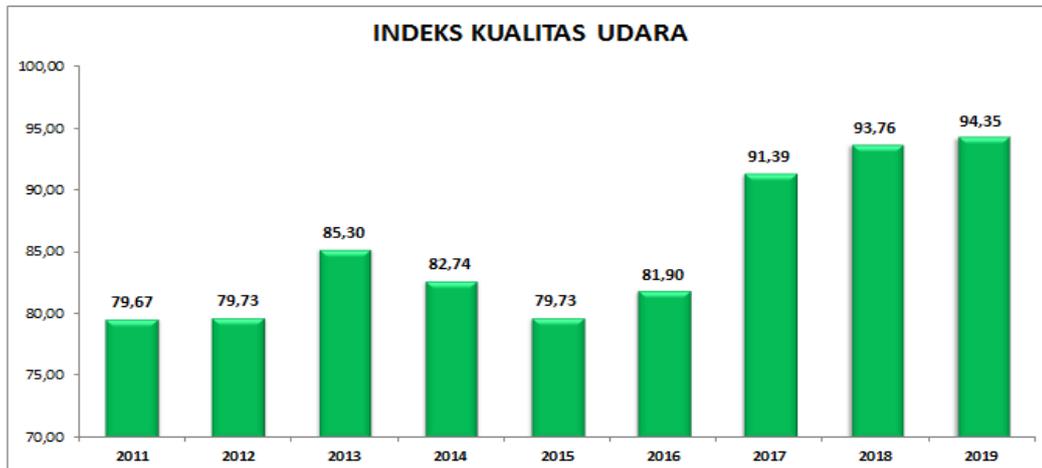
NO	LAUT	Tahun 2018-2019	Status	NO	LAUT	Tahun 2018-2019	Status	NO	LAUT	Tahun 2018-2019	Status
		Nilai IP				Nilai IP				Nilai IP	
1	PANTAI LEBIH	9,73	CEMAR SEDANG	10	PANTAI KELATING	9,51	CEMAR SEDANG	19	PANTAI CANDI DASA	4,04	CEMAR RINGAN
2	PANTAI KUSAMBA	9,73	CEMAR SEDANG	11	PANTAI TANAH LOT	9,58	CEMAR SEDANG	20	PANTAI GILMANUK	10	CEMAR BERAT
3	PANTAI NUSA DUA	9,41	CEMAR SEDANG	12	PANTAI C. BAWANG	8,31	CEMAR SEDANG	21	PANTAI PENGAMBENGAN	10,67	CEMAR BERAT
4	PANTAI GEGER	9,63	CEMAR SEDANG	13	PANTAI SANGSIT	0,6	MEMENUHI BM	22	PANTAI MEDEWI	9,12	CEMAR SEDANG
5	PANTAI KEDONGANAN	9,65	CEMAR SEDANG	14	PANTAI LOVINA	3,1	CEMAR RINGAN	23	PANTAI PERANCAK	8,79	CEMAR SEDANG
6	PANTAI KUTA	9,97	CEMAR SEDANG	15	PANTAI BARUNA	4,49	CEMAR RINGAN	24	PANTAI BENOA	8,2	CEMAR SEDANG
7	PANTAI SEMINYAK	7,71	CEMAR SEDANG	16	PANTAI PADANGBAI	0,55	MEMENUHI BM	25	PANTAI SANUR	8,24	CEMAR SEDANG
8	PANTAI BERAWA	9,21	CEMAR SEDANG	17	PANTAI TULAMBEN	6,86	CEMAR SEDANG	26	PANTAI TANJUNG BENOA	9,18	CEMAR SEDANG
9	PANTAI SOKA	8,23	CEMAR SEDANG	18	PANTAI UJUNG	8,17	CEMAR SEDANG				

Berdasarkan tabel di atas terdapat 2 (dua) sungai yang telah memenuhi baku mutu di Provinsi Bali yaitu Pantai Sangsit (Buleleng) dan Pantai Padangbai

(Karangasem). Sedangkan pantai berstatus cemar berat di Bali yaitu di Pantai Gilimanuk (Jembrana) dan Pantai Pengambangan (Jembrana).

Grafik

Indeks Kualitas Udara Bali Tahun 2011-2019 (Udara Ambien → Metode Hisap).



Sumber : Dinas Kehutan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Tahun 2019

Indeks Kualitas Udara di Bali dari Tahun 2015-2019 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada Tahun 2019 yaitu 94,35 lebih tinggi dibanding Tahun 2018 yaitu 93,76.

Tabel 3.25

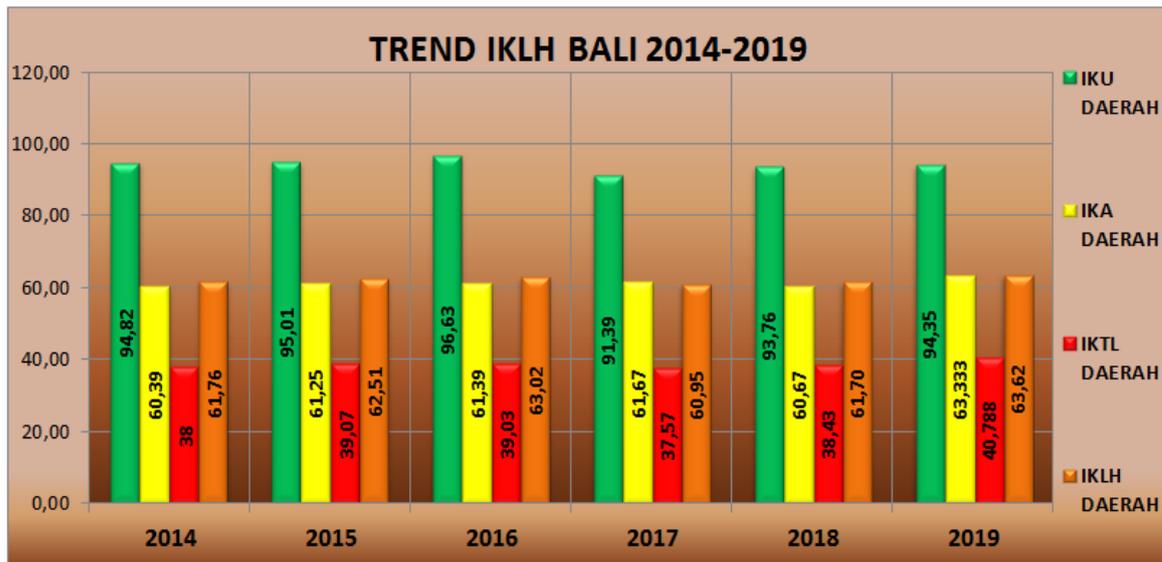
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2018-2019

ITL BALI				
Tahun	Luas Hutan/lahan (km ²)	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Luas Tutupan Hutan/Lahan	ITL $100 - (84,3 - \% \text{ Luas tutupan lahan}) \times (100-50) / (84,3-30)$
2019	112711,8222	563.666,00	19,996	40,788
2018	100867,4812	563.666,00	17,895	38,854

Sumber : Dinas Kehutan dan Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Bali Tahun 2019 sebesar 40,788 mengalami peningkatan dibanding dengan IKTL Tahun 2018 yaitu sebesar 38,854, dengan persentase luas tutupan hutan/lahan Tahun 2019 sebesar 19,996%.

Grafik 3.27
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2014-2019



Sumber ; Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Tahun 2019

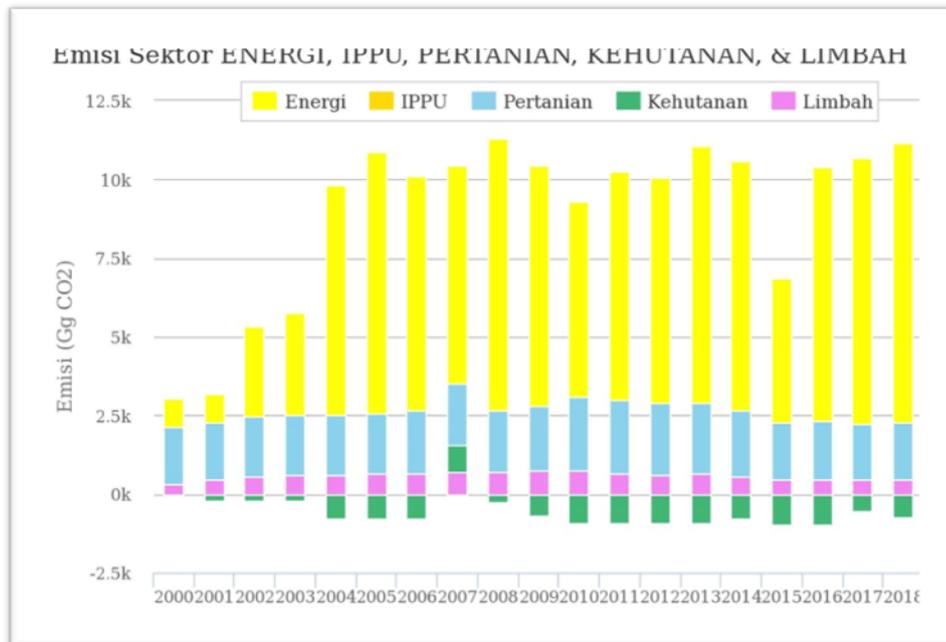
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Bali Tahun 2019 menunjukkan angka 63,62, dengan Indeks Kualitas Udara sebesar 94,35, Indeks Kualitas Air sebesar 63,33 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 40,788. IKLH Tahun 2019 telah mengalami peningkatan dibanding dengan IKLH Tahun 2018 yaitu sebesar 61,70. Hal ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan Indeks Kualitas Udara Tahun 2019 sebesar 94,35 lebih tinggi dibanding Tahun 2018 yaitu 93,76 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2019 sebesar 40,788 mengalami peningkatan dibanding dengan IKTL Tahun 2018 yaitu sebesar 38,854.

Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Provinsi Bali dilakukan dengan pemantauan dan pengumpulan data aktivitas sumber emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon serta penetapan faktor emisi dan faktor serapan GRK yang dikelompokkan dalam 4 (empat) sektor utama yaitu energi, pertanian, kehutanan, dan limbah. Inventarisasi GRK di Provinsi Bali yang dilakukan di 9

(sembilan) Kabupaten/ Kota menunjukkan adanya kenaikan emisi GRK yaitu sebesar 312,52Gg CO₂ e atau 3,09% dari tahun sebelumnya.

Grafik 3.28

Jumlah Emisi CO₂eq tahunan dari tahun 2000 sampai 2018 di Bali



Sumber : Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali 2019

Berdasarkan grafik di atas total emisi pada tahun 2018 adalah 10.411,31 Gg CO₂ e, 312,52Gg CO₂ e atau 3,09% dari tahun sebelumnya. Dari total emisi GRK tersebut sektor energi berkontribusi paling tinggi terhadap peningkatan emisi GRK yaitu 8.897,74 Gg CO₂ e atau 74,79%.

Emisi pada sektor pertanian dan limbah juga mengindikasikan kecenderungan meningkat, dimana sektor pertanian pada tahun 2018 menghasilkan emisi sebesar 1783,61 Gg CO₂ e atau mengalami peningkatan sebesar 26,92 Gg CO₂ e dari tahun 2017, sektor limbah pada tahun 2018 menghasilkan emisi sebesar 472,46 Gg CO₂ e atau mengalami peningkatan sebesar 1,05 Gg CO₂ e dari tahun 2017. Sementara itu, sektor Kehutanan mengindikasikan penyerapan emisi CO₂ sebesar (742,50) Gg CO₂ e pada Tahun 2018, meningkat dari sebelumnya (565,22) Gg CO₂ e. Sektor kehutanan



berkontribusi cukup tinggi dalam mengurangi emisi GRK di Provinsi Bali. Penjelasan di atas dapat digambarkan pada diagram berikut:

Penggunaan sumber daya terkait dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Gas Rumah Kaca dijabarkan sebagai berikut:

1. Perlunya pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati di tingkat Provinsi dan masing-masing Kabupaten/ Kota yang melibatkan OPD dan *stakeholders* sebagai wadah untuk memfasilitasi komunikasi, koordinasi dan perencanaan secara terpadu dan komprehensif;
2. Mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar, *stakeholders* serta masyarakat setempat melalui berbagai media sehingga tercipta pemahaman yang sama dan terwujud kesadaran terhadap pentingnya pelestarian Keanekaragaman Hayati
3. Melakukan langkah-langkah pengendalian pencemaran air yaitu:
 - sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan semua *stakeholder* seperti Pemerintah Kabupaten/ Kota, pihak swasta, LSM dan lembaga adat (banjar, desa adat) akan arti pentingnya sungai, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), tidak membuang sampah di sungai;
 - melaksanakan pengawasan dan penegakan aturan dengan sanksi bagi para pelaku usaha yang membuang limbah secara langsung ke sungai;
 - mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan upaya pengendalian pencemaran air melalui pembuatan instalasi pengolahan air limbah;
 - perlu dibangun IPAL komunal pada daerah yang berpotensi menyebabkan pencemaran sungai khususnya pada kawasan padat penduduk;
 - perlunya pengawasan terhadap kelayakan perijinan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan usaha;
 - mengendalikan aktivitas pertanian di sekitar daerah tangkapan air danau yang berpotensi mencemari kualitas air danau;



- perlunya kajian inventarisasi sumber-sumber pencemar sehingga diketahui berbagai kegiatan/ usaha yang berpotensi menurunkan kualitas air;
 - perlunya dilakukan penetapan kelas air sebagai dasar pemanfaatan sumber-sumber air di Provinsi Bali.
4. Sektor energy menyumbangkan emisi GRK sebesar yaitu 4.130.820 ton CO₂ e atau 84,27% di Provinsi Bali. Meskipun demikian jumlah emisi sektor energy mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2016 dan 2017 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sektor energy terdiri dari sub-sektor industry energy, industry manufaktur dan konstruksi, rumah tangga dan transportasi. Secara keseluruhan, sub-sektor transportasi menyumbangkan emisi GRK terbesar yaitu 3.383.250 ton CO₂ e atau 70,21% dan mengalami peningkatan sebesar 236.060 ton CO₂ e atau 7,5% dari tahun sebelumnya (2016). Selama kurun waktu 2004-2017 sub-sektor ini secara konsisten menghasilkan emisi terbesar pada sektor energy sehingga sub-sektor transportasi menjadi salah satu sub-sektor kunci emisi GRK di Provinsi Bali. Untuk sub-sektor transportasi jumlah kendaraan menjadi salah satu kunci utama emisi GRK karena jumlah kendaraan berbanding lurus dengan penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di Pulau Bali. Dibandingkan dengan data tahun 2016, jumlah penggunaan bahan bakar untuk transportasi darat cenderung meningkat meskipun dengan jumlah yang sangat kecil. Peningkatan jumlah emisi ini tidak lepas dari tingginya angka pertumbuhan kendaraan bermotor di Pulau Bali. Tercatat Pada tahun 2017, jumlah kendaraan bermotor mencapai 3.907.094 unit meningkat sekitar 181.702 unit dari tahun sebelumnya.

1. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.



Program dan Kegiatan yang mendukung penurunan angka kemiskinan pada Dinas Sosial Provinsi Bali tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Pemukiman dengan Kegiatan Bedah Rumah. Alokasi anggaran Rp.5.500.000.000,- terealisasi 5.334.307.800,- dengan target kinerja 100 unit dapat terealisasi 100 unit. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Sosial Provinsi Bali pada tahun 2019 memberikan bantuan bedah rumah sebanyak 100 unit yang tersebar di 6 kabupaten antara lain Jembrana (6 unit), Tabanan (6 unit), Klungkung (6 unit), Bangli (6 unit), Karangasem (30 unit), dan Buleleng (46 unit).
2. Program Penanganan Fakir Miskin dengan Kegiatan Penanganan Fakir Miskin. Alokasi anggaran Rp.70.000.000,- terealisasi Rp.66.250.000,- dengan target kinerja 1 laporan dapat terealisasi 1 laporan hasil monitoring. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga. Kegiatan Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Bali untuk melakukan monitoring dan evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah disalurkan pada tahun berjalan dengan tujuan mengetahui apakah Bantuan Pangan Non Tunai yang didanai dari APBN tahun 2019 telah diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), apakah telah tepat sasaran, tepat jumlah dan sesuai ketentuan, serta untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan *Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.*

Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam di Provinsi Bali bertujuan:

1. Untuk mengetahui kualitas air (sungai, danau, dan air laut) melalui pengujian parameter sesuai yang dipersyaratkan;
2. Untuk mengetahui kondisi kualitas udara ambien terutama untuk parameter PM_{10} , $PM_{2,5}$, NO_2 , SO_2 , Pb dan CO.



3. Tersedianya data-data emisi Gas Rumah Kaca secara akurat dari sektor-sektor terkait.
4. Tersedianya informasi secara berkala mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
5. Jumlah kawasan pariwisata strategis yang terpantau di Provinsi Bali.
6. Terpantaunya kerusakan di kawasan pesisir dan laut dan kegiatan yang ada di kawasan pesisir di Provinsi Bali.

Sub Kegiatan Pemantauan Kualitas Air

Pemantauan kualitas air Tahun 2019 dilaksanakan di 8 (delapan) Sungai lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dengan 24 (dua puluh empat) titik sampling, 4 (empat) Danau meliputi Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan dan Danau Tamblingan dengan 8 (delapan) titik sampling. Air Laut dilakukan pada perairan pesisir dekat pantai, yang meliputi pantai di kawasan pariwisata dan pelabuhan di Pantai Celukan Bawang, Pantai Padangbai, Pantai Gilimanuk, Pantai Pengambangan dan Pantai Benoa dengan 9 (sembilan) titik sampel. Total 41 sampel air.

Sub Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara

Pemantauan kualitas udara Tahun 2019 dilaksanakan di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dengan 6 (enam) parameter, CO, NO₂, SO₂, timbal Pb, PM₁₀ dan PM_{2,5}, dengan 4 (empat) titik pantau lokasi *sampling* yang meliputi Kawasan Terminal, Kawasan Pelabuhan/ Bandar Udara, Kawasan Pariwisata, Pasar dan Pusat Kota/ padat lalu-lintas yang ditetapkan di masing-masing 4 (empat) lokasi *sampling* di setiap kabupaten/ kota. Total 36 sampel udara.

Sub Kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca

Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Provinsi Bali dilakukan dengan pemantauan dan pengumpulan data aktivitas sumber emisi dan serapan GRK



termasuk simpanan karbon serta penetapan faktor emisi dan faktor serapan GRK yang dikelompokkan dalam 4 (empat) sektor utama yaitu energi, pertanian, kehutanan, dan limbah. Inventarisasi Gas Rumah Kaca dituangkan dalam 1 (satu) dokumen Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca.

Sub Kegiatan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Flora dan Fauna

Keanekaragaman hayati meliputi berbagai jenis tumbuhan, satwa, mikroorganisme, dan pola kehidupannya masing-masing. Setiap jenis tumbuhan, satwa dan organisme mempunyai manfaat dan peran yang berbeda-beda bagi fungsi ekologis dan kehidupan manusia. Pelaksanaan pembelian bibit tanaman dan penanaman pohon untuk meningkatkan tutupan lahan di luar kawasan hutan menuju taman Kehati seluas 1 (satu) Hektar yang dilaksanakan di Areal Pura Dalem Pingit, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu

Sumberdaya alam wilayah pesisir Provinsi Bali ditopang oleh keberadaan ekosistem pesisir yaitu ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun. Ekosistem tersebut menyediakan beragam jasa-jasa lingkungan sebagai daya tarik dan atraksi wisata. Pelaksanaan pemantauan ekosistem pesisir dan laut terpadu dilakukan di 13 (tiga belas) kawasan di Provinsi Bali.

Adapun realisasi fisik kegiatan ini telah mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 272.902.620,- (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) atau 98,03 % dari pagu anggaran.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Bali tahun 2019 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Bali. Setiap Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi internal melalui Pengukuran Pencapaian Sasaran yang telah disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2019, kinerja Pemerintah Provinsi Bali termasuk kategori baik. Meskipun demikian, sistem penilaian kinerja tersebut akan terus dikembangkan di antara masing-masing Perangkat Daerah sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Indikator kinerja kegiatan dan indikator sasaran juga akan disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran di masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dari data capaian kinerja yang tersaji pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali ini, terlihat bahwa realisasi program-program prioritas Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2019 telah berada pada jalur yang benar (*on the track*) menuju pada target-target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Tahun 2018-2023. Capaian kinerja indikator-indikator bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang kemiskinan sudah berada di atas capaian nasional.



Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali, pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Semesta Berencana Tahun 2018-2023.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI BALI

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KETERANGAN PENJELASAN
1	2	3		4	5	6
1	Memastikan Terpenuhiya Kebutuhan Pangan, Sandang dan Papan Dalam Jumlah dan Kualitas yang Memadai bagi Kehidupan Krama Bali	Terpenuhiya kebutuhan dasar Krama Bali dengan Kualitas yang layak	Tingkat Infasi Bali	Meningkatnya Ketahanan pangan bagi Krama Bali	Ketersediaan Pangan Utama	
2	Mewujudkan Kemandirian Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian serta Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTTP)	
				Meningkatnya kualitas hasil pertanian dan pertanian krama bali	Nilai Tukar Petani (NTP)	
					Nilai Tukar Nelayan (NTN)	

1	2	3		4	5	6
3	Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang terjangkau, Merata, Adil dan Berkualitas serta didukung dengan pengembangan Sistem dan Data Base Riwayat Kesehatan Krama Bali berbasis Kecataman	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	Umur Harapan Hidup (UHH)	Meningkatnya Standar kualitas Pelayanan kesehatan Krama Bali	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan	
4	Memastikan peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	Terwujudnya wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	Terwujudnya Wajib belajar 12 Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18	
				Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah terjangkau, merata, adil dan berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah	

1	2	3		4	5	6
5	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing Tinggi yaitu Berkualitas dan Berintegritas, Bermutu, Profesuonal dan Bermoral serta memiliki Jatidiri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali	Terwujudnya Daya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali unggul dan berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Daya Saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Provinsi Bali	
6	Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial secara Komprehensif dan Terintegrasi Bagi Kehidupan Krama Bali Sejak Mulai Lahir, Tumbuh dan berkembang sampai akhir masa Kehidupannya	Terwujudnya Kesejahteraan sosial Krama Bali	Persentase Kemiskinan	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Krama Bali	Persentase Kemiskinan	
7	Menghasilkan Tenaga Kerja yang Kompeten, Produktif, Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi Serta Memperluas Akses Kesempatan Kerja di Dalam dan di Luar Negeri	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan Berdaya Saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya kompetensi tenaga Kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	

1	2	3		4	5	6
8	Meningkatkan Promosi Pariwisata Bali di Dalam dan Luar Negeri Secara Bersinergi antar Kota/Kabupaten Se- Bali dengan mengembangkan Kreatifitas Inovasi	Meningkatnya pasar Pariwisata Bali	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Meningkatnya pasar Pariwisata Bali di Pasar Domestik dan Global	Jumlah Devisa Sektor Pariwisata	
9	Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataaan secara Komprehensif	Meningkatnya Kualitas pelayanan kepariwisataaan	indeks kepuasan wisatawan	Meningkatnya kualitas kepuasan wisatawan	Persentase kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara	
10	Membangun dan mengembangkan pusat perekonomian baru sesuai denganpotensi Kab/Kota Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi bali	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya investasi yang lebih merata di wilayah Bali	Persentase PMA DAN PMDN diluar wiayah SARBAGITA	
11	Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis Budaya (Branding Bali) untuk Memperkuat Perekonomian Krama Bali	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya bali	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali			

1	2	3		4	5	6
12	<p>MMENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT, LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI DAN TERKONEKSI ANTAR WILAYAH UNTUK Mendukung PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SERTA AKSES DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI BALI.</p>	<p>Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru</p>	<p>Indeks konektivitas</p>			
13	<p>MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN</p>	<p>Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan</p>	<p>Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum</p>	<p>Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.</p>	<p>Angka kriminalitas</p>	

1	2	3		4	5	6
14	MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI.	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Indeks demokrasi	Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase masyarakat Bali yang terdaftar sebagai pemilih dalam setiap Pemilu/Pilkada	
15	.MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH.	Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT)	Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks kualitas udara Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	
16	MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Survey eksternal pelayanan publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang	Indeks Reformasi Birokrasi	

1	2	3		4	5	6
	DAERAH YANG EFEKTIF, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH.			baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	

1	2	3		4	5	6
---	---	---	--	---	---	---

PD Penanggung Jawab
7

7

7

7

7

7

7

**PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH
PROVINSI BALI TAHUN 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas layak	Tingkat Inflasi Bali	3.5	2.37	147.68
		Persentase Ketersediaan pangan utama	100	n/a	0
2	Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	16	n/a	0
3	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	27	n/a	0
4	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	Nilai Tukar Petani (NTP)	104.1	104.93	100.79
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	116.6	103.33	88.62
5	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	Umur Harapan Hidup	71.8	71.68	99.83
6	Terwujudnya wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	10	9.89	98.9
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	82.54	82.54	100
7	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Angka harapan lama sekolah	13.49	13.49	100
8	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia	75.07	74.77	99.60
9	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali	65	n/a	0
10	Terwujudnya kesejahteraan sosial krama bali	Persentase Kemiskinan	3.85	3.61	106.64
11	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompoten dan berdaya saing	Tingkat pengangguran terbuka	1.28	1.52	84.21

12	Meningkatnya kompetensi tenaga	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75.77	73.87	97.49
13	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Indeks Kebahagiaan	72.48	72.48	100
14	Meningkatnya pasar Periwisata Bali	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	45	45	100
15	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	Jumlah Devisa sektor pariwisata	0	19,458,000	N/A
16	Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	Indeks Kepuasan wisatawan	77	79	102.59
17	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	6.25	5.34	85.44
18	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya bali	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	11	n/a	0
19	Meningkatnya kuantitas dan kualitas indrastruktur dasar, laut dan udara secara terintegrasi an terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Indeks konektivitas	2.7	2.5	92.59
20	Meningkatnya rasa aman Krama Bali dan Wisata melakukan aktivitas kehidupannya	Angka Kriminalitas	4.138	4.037	97.56
21	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Indeks demokrasi	79	82.37	104.26
		Indeks Pemberdayaan gender	64.23	64.18	99.92
22	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	Persentase Daya dukung lingkungan	17.11	n/a	0
23	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62.08	62.62	100.86
		Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	9.7	8.57	88.35
		Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	0.43	0	0

24	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	68	n/a	0
----	--	----------------------------	----	-----	---

PERJANJIAN KINERJA PROVINSI BALI

TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2019
1	2	3	4
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas layak	Tingkat Inflasi Bali	3.5
		Persentase Ketersediaan pangan utama	100
2	Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	16
3	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	27
4	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	Nilai Tukar Petani (NTP)	104.1
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	116.6
5	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	Umur Harapan Hidup	71.8
6	Terwujudnya wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	10
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	82.54
7	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Angka harapan lama sekolah	13.49
8	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia	75.07
9	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali	65
10	Terwujudnya kesejahteraan sosial krama bali	Persentase Kemiskinan	3.85
11	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing	Tingkat pengangguran terbuka	1.28
12	Meningkatnya kompetensi tenaga	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75.77
13	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Indeks Kebahagiaan	72.48
14	Meningkatnya pasar Pariwisata Bali	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	45

15	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	Jumlah Devisa sektor pariwisata	0
16	Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	Indeks Kepuasan wisatawan	77
17	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	6.25
18	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya bali	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	11
19	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar, laut dan udara secara terintegrasi an terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Indeks konektivitas	2.7
20	Meningkatnya rasa aman Krama Bali dan Wisata melakukan aktivitas kehidupannya	Angka Kriminalitas	4.138
21	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Indeks demokrasi	79
		Indeks Pemberdayaan gender	64.23
22	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	Persentase Daya dukung lingkungan	17.11
23	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62.08
		Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	9.7
		Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	0.43
24	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	68